



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Setiabudi No. 201C Srandol, Banyumanik SEMARANG**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO.201C SRONDOL SEMARANG

TELP. (024) 7473746, 7473800, 7474170 FAX. (024) 7473800

E-mail : dinas.arpusjateng@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 31 Desember 2023



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19720502 199903 1 008

DAFTAR ISI

		Halaman
I	Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran	i
II	Daftar Isi	ii
III	Laporan Realisasi Anggaran SKPD	iii
IV	Neraca Komparatif SKPD	vi
V	Laporan Operasional SKPD	x
VI	Laporan Perubahan Ekuitas SKPD	xii
VII	Catatan Atas Laporan Keuangan	
Bab 1	Pendahuluan	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
Bab 2	Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan	6
	2.1. Ekonomi Makro	6
	2.2. Kebijakan Keuangan	9
Bab 3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	11
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	11
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	16
Bab 4	Kebijakan Akuntansi	19
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD	19
	4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	19
	4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	20
	4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada SKPD	38
Bab 5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	39
	5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	39
	5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca	48
	5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional	53
	5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	61
Bab 6	Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	63
	6.1. Gambaran Umum	63
	6.2. Tugas Dan Fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	63
	6.3. Visi Dan Misi	64
	6.4. Struktur Organisasi	64
Bab 7	Penutup	67
	Lampiran Tambahan	



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN DAERAH					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pajak Daerah		-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-	-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan		-	-	-	-
8	Pajak Rodok		-	-	-	-
9	Retribusi Daerah		90.000.000,00	70.773.500,00	78,64	42.465.500,00
10	Retribusi Jasa Umum		-	-	-	-
11	Retribusi Jasa Usaha		90.000.000,00	70.773.500,00	78,64	42.465.500,00
12	Retribusi Perizinan Tertentu		-	-	-	-
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-	-	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-	-	-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-	-	-
17	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		-	2.750.000,00	-	26.811.000,00
18	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
20	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-	-	-
21	Hasil Kerja Sama Daerah		-	-	-	-
22	Jasa Giro		-	-	-	-
23	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
24	Pencapetan Bunga		-	-	-	-
25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-	-	-
26	Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain		-	2.750.000,00	-	26.811.000,00
27	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing		-	-	-	-
28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-	-	-
29	Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-	-	-
30	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-	-	-
31	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-	-	-
32	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	-	-
33	Pendapatan BLUD		-	-	-	-
34	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan		-	-	-	-
35	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-	-	-
36	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-	-	-
37	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-	-	-
38	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-	-	-
39	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf		-	-	-	-
40	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		90.000.000,00	73.523.500,00	81,69	69.276.500,00
41						
42	PENDAPATAN TRANSFER					
43	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-
44	Dana Pembiayaan		-	-	-	-
45	Dana Insentif Daerah (DID)		-	-	-	-
46	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	-	-
47	Pendapatan Bagi Hasil		-	-	-	-
48	Bantuan Keuangan		-	-	-	-
49	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	-
50						
51	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
52	Pendapatan Hibah		-	-	-	-
53	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
55	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri		-	-	-	-
56	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		-	-	-	-
57	Sumoangan Pihak ketiga/Sejenis		-	-	-	-
58	Dana Darurat		-	-	-	-
59	Dana Darurat		-	-	-	-
60	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
61	Lain-lain Pendapatan		-	-	-	-
62	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		-	-	-	-
63	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah		-	-	-	-
64						
65	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		90.000.000,00	73.523.500,00	81,69	69.276.500,00
66						
67	BELANJA DAERAH					
68	BELANJA OPERASI					
69	Belanja Pegawai		26.008.480.000,00	26.314.408.703,00	97,70	25.451.471.122,00
70	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		12.734.238.000,00	12.289.742.954,00	96,51	12.707.836.578,00
71	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		13.966.942.000,00	13.818.115.749,00	98,93	12.533.815.244,00
72	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		207.300.000,00	206.550.000,00	99,64	206.789.000,00
73	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-
74	Belanja Gaji dan Tunjangan KOWKDH		-	-	-	-
75	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KOWKDH		-	-	-	-
76	Belanja Gaji dan Tunjangan MRP		-	-	-	-
77	Belanja Pegawai BOS		-	-	-	-
78	Belanja Pegawai BLUD		-	-	-	-

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
79	Belanja Barang dan Jasa		6.724.236.000,00	6.652.779.094,00	98,94	4.476.548.733,00
80	Belanja Barang		1.204.463.000,00	1.203.514.909,00	99,92	557.663.792,00
81	Belanja Jasa		3.676.605.000,00	3.626.534.266,00	98,64	3.307.087.866,00
82	Belanja Pemeliharaan		611.225.000,00	607.710.150,00	99,42	219.416.000,00
83	Belanja Perjalanan Dinas		1.156.442.000,00	1.155.019.770,00	99,88	356.079.075,00
84	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		75.500.000,00	60.000.000,00	79,47	36.300.000,00
85	Belanja Barang dan Jasa BOP		-	-	-	-
86	Belanja Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
87	Belanja Barang dan Jasa BLUD		-	-	-	-
88	Belanja Bunga		-	-	-	-
89	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
90	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
91	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
92	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
93	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	-
94	Belanja Bunga Utang Pinjaman RI LUD		-	-	-	-
95	Belanja Subsidi		-	-	-	-
96	Belanja Subsidi kepada BUMN		-	-	-	-
97	Belanja Subsidi kepada BUMD		-	-	-	-
98	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	-
99	Belanja Subsidi kepada Koperasi		-	-	-	-
100	Belanja Hibah		-	-	-	-
101	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
102	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
103	Belanja Hibah kepada BUMN		-	-	-	-
104	Belanja Hibah kepada BUMD		-	-	-	-
105	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Komunitas yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-	-	-
106	Belanja Hibah Dana BOS		-	-	-	-
107	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-	-
108	Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-
109	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	-	-
110	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	-	-
111	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	-	-
112	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	-	-
113	Jumlah Belanja Operasi		33.632.716.000,00	32.967.187.797,00	98,02	29.928.017.955,00
114						
115	BELANJA MODAL					
116	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
117	Belanja Modal Tanah		-	-	-	-
118	Belanja Modal Tanah BLUD		-	-	-	-
119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		337.190.000,00	335.123.000,00	99,39	7.996.000,00
120	Belanja Modal Alat Besar		-	-	-	-
121	Belanja Modal Alat Angkutan		-	-	-	-
122	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		-	-	-	-
123	Belanja Modal Alat Pertanian		-	-	-	-
124	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		179.600.000,00	179.562.000,00	99,98	3.896.000,00
125	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		4.660.000,00	4.660.000,00	100,00	-
126	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-	-	-
127	Belanja Modal Alat Laboratorium		-	-	-	-
128	Belanja Modal Alat Pemasokan		-	-	-	-
129	Belanja Modal Komputer		151.930.000,00	150.411.000,00	99,00	4.000.000,00
130	Belanja Modal Alat Eksplorasi		-	-	-	-
131	Belanja Modal Alat Pengeboran		1.000.000,00	490.000,00	49,00	-
132	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-	-	-
133	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi		-	-	-	-
134	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	-	-
135	Belanja Modal Alat Peraga		-	-	-	-
136	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi		-	-	-	-
137	Belanja Modal Rambu-rambu		-	-	-	-
138	Belanja Modal Peralatan Olahraga		-	-	-	-
139	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS		-	-	-	-
140	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		-	-	-	-
141	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
142	Belanja Modal Bangunan Gedung		-	-	-	-
143	Belanja Modal Monumen		-	-	-	-
144	Belanja Modal Bangunan Menara		-	-	-	-
145	Belanja Modal Fugu Teknik Kontrol/Pastu		-	-	-	-
146	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		-	-	-	-
147	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan		-	-	-	-
148	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		-	-	-	-
149	Belanja Modal Bangunan Air		-	-	-	-
150	Belanja Modal Instalasi		-	-	-	-
151	Belanja Modal Jaringan		-	-	-	-
152	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD		-	-	-	-
153	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		427.000.000,00	426.593.173,00	99,90	36.052.726,00
154	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		427.000.000,00	426.593.173,00	99,90	36.052.726,00
155	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		-	-	-	-
156	Belanja Modal Hewan		-	-	-	-
157	Belanja Modal Biotek Perairan		-	-	-	-
158	Belanja Modal Tanaman		-	-	-	-
159	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya		-	-	-	-
160	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-	-	-
161	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		-	-	-	-
162	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		-	-	-	-
163	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		-	-	-	-
164	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
165	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud		-	-	-	-
166	Belanja Modal Aset Lainnya RI LUD		-	-	-	-
167	Jumlah Belanja Modal		764.190.000,00	761.715.173,00	99,68	44.048.726,00
168						

NO	URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
169	BELANJA TAK TERDUGA				-	
170	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
171	Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
172	Jumlah Belanja Tidak Terduga		-	-	-	-
173					-	
174	BELANJA TRANSFER				-	
175	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-
176	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	-	-
177	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-
178	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	-	-
179	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
180	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	-	-
181	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-	-
182	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	-	-
183	Jumlah Belanja Transfer		-	-	-	-
184					-	
185	JUMLAH BELANJA DAERAH		34.396.906.000,00	33.728.903.970,00	98,06	29.972.066.581,00
186					-	
187	SURPLUS/DEFISIT		(34.306.906.000,00)	(33.655.380.470,00)	98,10	(29.902.790.081,00)
188					-	
189	PEMBIAYAAN DAERAH				-	
190	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				-	
191	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
192	Pelampauan Penerimaan PAD		-	-	-	-
193	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-	-	-
194	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-	-	-
195	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
196	Penghematan Belanja		-	-	-	-
197	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselamatkan		-	-	-	-
198	Sisa Dana Abat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana		-	-	-	-
199	Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
199	Sisa Belanja Lainnya		-	-	-	-
200	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		-	-	-	-
201	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
202	Pencairan Dana Cadangan		-	-	-	-
203	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
204	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
205	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-
206	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
207	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
208	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
209	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
210	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
211	Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	-	-
212	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
213	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
214	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
215	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD		-	-	-	-
216	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN		-	-	-	-
217	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi		-	-	-	-
218	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat		-	-	-	-
219	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	-	-
220	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
221	Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD		-	-	-	-
222	Divestasi BLUD		-	-	-	-
223	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		-	-	-	-
224					-	
225	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				-	
226	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
227	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
228	Penyerahan Modal Daerah		-	-	-	-
229	Penyerahan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)		-	-	-	-
230	Penyerahan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-	-	-
231	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	-	-
232	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		-	-	-	-
233	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
234	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
235	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
236	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat		-	-	-	-
237	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
238	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
239	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
240	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD		-	-	-	-
241	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN		-	-	-	-
242	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi		-	-	-	-
243	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat		-	-	-	-
244	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada BLUD		-	-	-	-
245	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-
246	Pinjaman BLUD		-	-	-	-
247	Investasi BLUD		-	-	-	-
248	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
249					-	
250	PEMBIAYAAN NETTO		-	-	-	-
251					-	
252	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)		(34.306.906.000,00)	(33.655.380.470,00)		(29.902.790.081,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA KOMPARATIF
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	2023	2022
1	ASET			
2	ASET LANCAR			
3	Kas dan Setara Kas		-	-
4	Kas di Kas Daerah		-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
7	Kas di BLUD		-	-
8	Kas Dana BOS		-	-
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		-	-
10	Kas Lainnya		-	-
11	Setara Kas		-	-
12	Kas Dana Desa		-	-
13	Kas Dana BOSP		-	-
14	Kas Dana BOK Puskesmas		-	-
15	Investasi Jangka Pendek		-	-
16	Investasi dalam Saham		-	-
17	Investasi dalam Deposito		-	-
18	Investasi dalam SUN		-	-
19	Investasi dalam SBI		-	-
20	Investasi dalam SPN		-	-
21	Investasi Jangka Pendek BLUD		-	-
22	Piutang Pajak Daerah		-	-
23	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		-	-
24	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		-	-
25	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-	-
26	Piutang Pajak Air Permukaan		-	-
27	Piutang Pajak Rokok		-	-
28	Piutang Pajak Hotel		-	-
29	Piutang Pajak Restoran		-	-
30	Piutang Pajak Hiburan		-	-
31	Piutang Pajak Reklame		-	-
32	Piutang Pajak Penerangan Jalan		-	-
33	Piutang Pajak Parkir		-	-
34	Piutang Pajak Air Tanah		-	-
35	Piutang Pajak Sarang Burung Walet		-	-
36	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		-	-
37	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		-	-
38	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		-	-
39	Piutang Retribusi Daerah		-	-
40	Piutang Retribusi Jasa Umum		-	-
41	Piutang Retribusi Jasa Usaha		-	-
42	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		-	-
43	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
44	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		-	-
45	Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		-	-
46	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		-	-
47	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-	-
48	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
49	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
50	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
51	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		-	-
52	Piutang Jasa Giro		-	-
53	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
54	Piutang Pendapatan Bunga		-	-
55	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		-	-
56	Piutang Penerimaan Komisi Potongan, atau Bentuk Lain		-	-
57	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		-	-
58	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		-	-
59	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		-	-
60	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-
61	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-
62	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		-	-
63	Piutang Pendapatan BLUD		-	-
64	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		-	-
65	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		-	-
66	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		-	-
67	Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		-	-
68	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		-	-
69	Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		-	-
70	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak		-	-

NO	URAIAN	REF	2023	2022
71	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-
72	Piutang Dana Perimbangan		-	-
73	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		-	-
74	Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur		-	-
75	Piutang Dana Keistimewaan		-	-
76	Piutang Dana Desa		-	-
77	Piutang Insentif Fiskal		-	-
78	Piutang Transfer Antar Daerah		-	-
79	Piutang Bagi Hasil		-	-
80	Piutang Bantuan Keuangan		-	-
81	Piutang Lainnya		-	-
82	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		-	-
83	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		-	-
84	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
85	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
86	Uang Muka		-	-
87	Penyisihan Piutang		-	-
88	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-
89	Penyisihan Piutang Lainnya		-	-
90	Beban Dibayar Dimuka		10.693.501,62	-
91	Beban Dibayar Dimuka		10.693.501,62	-
92	Beban Dibayar Dimuka-Sewa		-	-
93	Persediaan		45.919.500,00	947.750,00
94	Barang Pakai Habis		45.919.500,00	947.750,00
95	Barang Tak Habis Pakai		-	-
96	Barang Bekas Dipakai		-	-
97	JUMLAH ASET LANCAR		56.613.001,62	947.750,00
98				
99	INVESTASI JANGKA PANJANG			
100	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
101	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-
102	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		-	-
103	Investasi dalam Obligasi		-	-
104	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-
105	Dana Bergulir		-	-
106	Investasi Jangka Panjang Permanen		-	-
107	Penyertaan Modal		-	-
108	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
109	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		-	-
110				
111	ASET TETAP			
112	Tanah		4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
113	Tanah		4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
114	Peralatan dan Mesin		36.307.825.761,00	35.461.772.261,00
115	Alat Besar		4.065.823.260,00	4.065.823.260,00
116	Alat Angkutan		5.890.636.345,00	5.470.636.345,00
117	Alat Bengkel dan Alat Ukur		2.056.129.956,00	2.056.129.956,00
118	Alat Pertanian		-	-
119	Alat Kantor dan Rumah Tangga		13.734.463.488,00	13.536.986.998,00
120	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		4.691.826.256,00	4.687.166.256,00
121	Alat Kedokteran dan Kesehatan		-	-
122	Alat Laboratorium		90.230.000,00	90.230.000,00
123	Alat Peralatan		-	-
124	Komputer		5.778.716.446,00	5.554.799.446,00
125	Alat Eksplorasi		-	-
126	Alat Pengeboran		-	-
127	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		-	-
128	Alat Bantu Eksplorasi		-	-
129	Alat Keselamatan Kerja		-	-
130	Alat Peraga		-	-
131	Peralatan Proses/Produksi		-	-
132	Rambu-rambu		-	-
133	Peralatan Olahraga		-	-
134	Gedung dan Bangunan		23.062.733.617,00	23.062.733.617,00
135	Bangunan Gedung		22.719.853.147,00	22.719.853.147,00
136	Monumen		-	-
137	Bangunan Monara		-	-
138	Tugu Titik Kontrol/Past		342.880.670,00	342.880.670,00
139	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		206.975.000,00	206.975.000,00
140	Jalan dan Jembatan		-	-
141	Bangunan Air		190.275.000,00	190.275.000,00
142	Instalasi		-	-
143	Jaringan		16.700.000,00	16.700.000,00
144	Aset Tetap Lainnya		14.075.390.408,00	13.520.007.035,00
145	Bahan Perpustakaan		14.065.351.637,00	13.509.963.464,00
146	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		10.038.571,00	10.038.571,00
147	Hewan		-	-
148	Biota Perairan		-	-
149	Tanaman		-	-
150	Barang Koleksi Non Budaya		-	-
151	Aset Tetap Dalam Renovasi		-	-
152	Konstruksi dalam Pengerjaan		133.276.000,00	133.276.000,00
153	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
154	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah		-	-
155	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin		-	-
156	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan		133.276.000,00	133.276.000,00
157	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
158	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya		-	-
159	Akumulasi Penyusutan		(46.923.772.311,51)	(45.804.385.377,13)
160	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(34.596.464.416,63)	(33.963.763.465,70)
161	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(12.219.048.781,98)	(11.738.611.750,74)
162	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(108.259.112,90)	(102.010.161,29)
163	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-
164	JUMLAH ASET TETAP		31.408.928.674,49	31.226.878.735,87
165				
166	DANA CADANGAN			
167	Dana Cadangan		-	-
168	Dana Cadangan		-	-
169	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-

NO	URAIAN	REFF	2023	2022
170				
171	ASET LAINNYA			
172	Tagihan Jangka Panjang		-	-
173	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
174	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
175	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
176	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
177	Aset Tak Berwujud		193.550.000,00	193.550.000,00
178	Aset Tak Berwujud		193.550.000,00	193.550.000,00
179	Aset Lain-lain		1.498.028.824,00	1.498.028.824,00
180	Aset Lain-lain		1.498.028.824,00	1.498.028.824,00
181	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(193.550.000,00)	(193.550.000,00)
182	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(193.550.000,00)	(193.550.000,00)
183	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(1.498.028.824,00)	(1.498.028.824,00)
184	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(1.498.028.824,00)	(1.498.028.824,00)
185	Kas yang Dibatali Penggunaannya		-	-
186	Uang Jaminan dan/atau Titipan Uang Muka		-	-
187	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		-	-
188	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		-	-
189	JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
190				
191	JUMLAH ASET		31.465.541.676,11	31.227.826.485,87
192				
193	KEWAJIBAN			
194	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
195	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		-	-
196	Utang Taspen		-	-
197	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		-	-
198	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		-	-
199	Utang Iuran Jaminan Kematian		-	-
200	Utang PPh Pusat		-	-
201	Utang PPN Pusat		-	-
202	Utang Taperum		-	-
203	Utang Iuran Wajib Pegawai		-	-
204	Utang Pihak Ketiga Lainnya		-	-
205	Utang Bunga		-	-
206	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		-	-
207	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-
208	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
209	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
210	Utang Bunga kepada Masyarakat		-	-
211	Utang Bunga melalui BLUD		-	-
212	Utang Pinjaman Jangka Pendek		-	-
213	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		-	-
214	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
215	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
216	Utang Pinjaman BLUD		-	-
217	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
218	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		-	-
219	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
220	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
221	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		-	-
222	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek melalui BLUD		-	-
223	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-
224	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III		-	-
225	Uang Muka Penjualan Produk Pemda dan Pihak III		-	-
226	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		-	-
227	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa		-	-
228	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah		-	-
229	Utang Belanja		-	-
230	Utang Belanja Pegawai		-	-
231	Utang Belanja Barang dan Jasa		-	-
232	Utang Belanja Bunga		-	-
233	Utang Belanja Subsidi		-	-
234	Utang Belanja Hibah		-	-
235	Utang Belanja Modal Tanah		-	-
236	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-
237	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-	-
238	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		-	-
239	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-
240	Utang Belanja Tidak Terduga		-	-
241	Utang Belanja Bagi Hasil		-	-
242	Utang Belanja Bantuan Keuangan		-	-
243	Utang Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		-	-
244	Utang Belanja Modal Aset Lainnya BLUD		-	-
245	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
246	Utang Kelebihan Pembayaran PAD		-	-
247	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		-	-
248	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		-	-
249	Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
250	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
251				
252	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
253	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
254	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		-	-
255	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		-	-
256	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
257	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
258	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN		-	-
259	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD		-	-
260	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta		-	-
261	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-
262	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN		-	-
263	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD		-	-
264	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta		-	-
265	Utang kepada Masyarakat		-	-
266	Obligasi		-	-
267	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
268				
269	JUMLAH KEWAJIBAN		-	-

NO	URAIAN	REF	2023	2022
270				
271	EKUITAS			
272	EKUITAS		(2.189.838.793,89)	1.325.036.404,87
273	Ekuitas		31.227.826.485,87	32.860.836.510,26
274	Surplus/Defisit-LD		(33.417.865.279,76)	(31.535.800.105,39)
275	Ekuitas SAL		-	-
276	Estimas Pendapatan		-	-
277	Estimas Penerimaan Pembiayaan		-	-
278	Apropriasi Belanja		-	-
279	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan		-	-
280	Estimas Perubahan SAL		-	-
281	Surplus/Defisit-LRA		-	-
282	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		33.655.380.470,00	29.902.790.081,00
283	RK PPKD		33.655.380.470,00	29.902.790.081,00
284	JUMLAH EKUITAS		31.465.541.676,11	31.227.826.485,87
285				
286	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		31.465.541.676,11	31.227.826.485,87

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEPELOPOAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS ARPUS

DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP, M. SI

006.197.0502 199903 1 008



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2023	2022	Kesalahan/Perubahan	%
1	PENDAPATAN - LO					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO		-	-	-	-
4	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		-	-	-	-
5	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		-	-	-	-
6	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO		-	-	-	-
7	Pajak Air Permukaan - LO		-	-	-	-
8	Pajak Rokok - LO		-	-	-	-
9	Pendapatan Retribusi Daerah - LO		70.773.500,00	42.465.500,00	28.308.000,00	66,66
10	Retribusi Jasa Umum - LO		-	-	-	-
11	Retribusi Jasa Usaha - LO		70.773.500,00	42.465.500,00	28.308.000,00	66,66
12	Retribusi Perizinan Tertentu - LO		-	-	-	-
13	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-	-	-	-
14	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO		-	-	-	-
15	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO		-	-	-	-
16	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO		-	-	-	-
17	Lain-Lain PAD yang Sah - LO		2.750.000,00	26.811.000,00	(24.061.000,00)	(89,74)
18	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	-
19	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	-
20	Hasil Penanaman BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	-
21	Hasil Kerja Sama Daerah - LO		-	-	-	-
22	Jasa Giro - LO		-	-	-	-
23	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	-
24	Pendapatan Bunga - LO		-	-	-	-
25	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi/Kerusakan Daerah - LO		-	-	-	-
26	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO		2.750.000,00	26.811.000,00	(24.061.000,00)	(89,74)
27	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO		-	-	-	-
28	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		-	-	-	-
29	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO		-	-	-	-
30	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO		-	-	-	-
31	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		-	-	-	-
32	Pendapatan dan Pengembalian - LO		-	-	-	-
33	Pendapatan BLUD - LO		-	-	-	-
34	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO		-	-	-	-
35	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO		-	-	-	-
36	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO		-	-	-	-
37	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO		-	-	-	-
38	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO		-	-	-	-
39	Pendapatan Zakat - LO		-	-	-	-
40	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		73.523.500,00	69.276.500,00	4.247.000,00	6,13
41						
42	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
43	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO		-	-	-	-
44	Dana Perimbangan-LO		-	-	-	-
45	Dana Insentif Daerah (DD)-LO		-	-	-	-
46	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		-	-	-	-
47	Pendapatan Bagi Hasil- LO		-	-	-	-
48	Bantuan Keuangan - LO		-	-	-	-
49	Jumlah Pendapatan Transfer - LO		-	-	-	-
50						
51	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO					
52	Pendapatan Hibah- LO		540.210.700,00	127.499.800,00	412.710.900,00	323,70
53	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO		540.210.700,00	-	540.210.700,00	-
54	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO		-	-	-	-
55	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO		-	-	-	-
56	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO		-	127.499.800,00	(127.499.800,00)	(100,00)
57	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenta- LO		-	-	-	-
58	Dana Darurat- LO		-	-	-	-
59	Dana Darurat- LO		-	-	-	-
60	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO		-	-	-	-
61	Lain-lain Pendapatan- LO		-	-	-	-
62	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO		540.210.700,00	127.499.800,00	412.710.900,00	323,70
63						
64	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH-LO		613.734.200,00	196.776.300,00	416.957.900,00	211,89
65						
66	BEBAN					
67	BEBAN OPERASIONAL					
68	Beban Pegawai		26.314.408.703,00	25.451.471.122,00	862.937.581,30	3,39
69	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		1.159.033.159,00	12.707.886.878,00	(418.143.824,00)	(3,29)
70	Beban Tambahan Penghasilan ASN		13.818.115.749,00	12.533.815.244,00	1.284.300.505,00	10,25
71	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		206.550.000,00	209.769.000,00	(3.219.000,00)	(1,53)
72	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD		-	-	-	-
73	Beban Gaji dan Tunjangan KDHWKDH		-	-	-	-
74	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHWKDH		-	-	-	-
75	Beban Gaji dan Tunjangan MRP		-	-	-	-
76	Beban Pegawai BOS		-	-	-	-
77	Beban Pegawai BOSP		-	-	-	-
78	Beban Pegawai BLUD		-	-	-	-
79	Beban Barang dan Jasa		6.597.603.842,38	4.617.732.920,47	1.979.870.921,91	42,88
80	Beban Barang		1.159.033.159,00	665.604.977,00	493.348.182,00	74,11
81	Beban Jasa		3.615.840.763,38	3.338.307.001,90	277.443.761,58	8,31
82	Beban Pemeliharaan		607.710.150,00	221.271.866,67	386.438.283,33	174,64
83	Beban Perjalanan Dinas		1.155.019.770,00	358.079.075,00	796.940.695,00	224,37
84	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diterangkan/Dijual Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		60.000.000,00	36.300.000,00	23.700.000,00	65,29
85	Beban Barang dan Jasa BOP		-	-	-	-
86	Beban Barang dan Jasa BOS		-	-	-	-
87	Beban Bunga		-	-	-	-
88	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
89	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain		-	-	-	-
90	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-	-	-
91	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		-	-	-	-
92	Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)		-	-	-	-
93	Beban Bunga Utang Pinjaman BLUD		-	-	-	-
94	Beban Subsidi		-	-	-	-

NO	URAIAN	REF	2023	2022	Kemungkinan (Penurunan)	%
94	Beban Subsidi kepada BUMN		-	-	-	-
95	Beban Subsidi kepada BUMD		-	-	-	-
96	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		-	-	-	-
97	Beban Subsidi kepada Koperasi		-	-	-	-
98	Beban Hibah		-	-	-	-
99	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	-	-
100	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-
101	Beban Hibah kepada BUMN		-	-	-	-
102	Beban Hibah kepada BUMD		-	-	-	-
103	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		-	-	-	-
104	Beban Hibah Dena BOS		-	-	-	-
105	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		-	-	-	-
106	Beban Bantuan Sosial		-	-	-	-
107	Beban Bantuan Sosial kepada Individu		-	-	-	-
108	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga		-	-	-	-
109	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	-	-
110	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)		-	-	-	-
111	Beban Penyisihan Piutang		-	-	-	-
112	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah		-	-	-	-
113	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		-	-	-	-
114	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
115	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		-	-	-	-
116	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		-	-	-	-
117	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		-	-	-	-
118	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		-	-	-	-
119	Beban Penyusutan dan Amortisasi		1.119.366.934,38	1.663.372.362,92	(543.985.428,54)	(32,70)
120	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		632.700.951,53	1.176.606.380,11	(543.985.428,58)	(40,23)
121	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		480.437.031,24	480.437.031,20	0,04	0,00
122	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		6.248.951,61	6.248.951,61	-	-
123	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
124	Beban Penyusutan Aset Lainnya		-	-	-	-
125	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		-	-	-	-
126	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain		-	-	-	-
128	Beban Lain-Lain		-	-	-	-
127	Beban Lain-Lain		-	-	-	-
129	Jumlah Beban Operasional		34.031.399.479,76	31.732.576.405,39	2.298.823.074,37	7,24
129						
130						
131	BEBAN TRANSFER					
132	Beban Bagi Hasil		-	-	-	-
133	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		-	-	-	-
134	Beban Bantuan Keuangan		-	-	-	-
135	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		-	-	-	-
136	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-
137	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota		-	-	-	-
138	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		-	-	-	-
139	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		-	-	-	-
140	Jumlah Beban Transfer		-	-	-	-
141						
142	JUMLAH BEBAN		34.031.399.479,76	31.732.576.405,39	2.298.823.074,37	7,24
143						
144	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL		(32.417.665.279,76)	(31.635.800.105,39)	(1.881.865.174,37)	5,97
145						
146	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
147	SURPLUS NON OPERASIONAL					
148	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		-	-	-	-
149	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	-
150	Surplus Pemukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	-
151	Surplus Pelepasan investasi Jangka Panjang-LO		-	-	-	-
152	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		-	-	-	-
153	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO		-	-	-	-
154	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO		-	-	-	-
155	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO		-	-	-	-
156	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO		-	-	-	-
157	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO		-	-	-	-
158	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO		-	-	-	-
159	Surplus Pelepasan investasi Jangka Pendek-LO		-	-	-	-
160	Jumlah Surplus Non Operasional		-	-	-	-
161						
162	DEFISIT NON OPERASIONAL					
163	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		-	-	-	-
164	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	-
165	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	-
166	Defisit Pelepasan investasi Jangka Panjang-LO		-	-	-	-
167	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		-	-	-	-
168	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		-	-	-	-
169	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO		-	-	-	-
170	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO		-	-	-	-
171	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO		-	-	-	-
172	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO		-	-	-	-
173	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO		-	-	-	-
174	Defisit Pelepasan investasi Jangka Pendek-LO		-	-	-	-
175	Jumlah Defisit Non Operasional		-	-	-	-
176						
177	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-	-	-
178						
179	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(32.417.665.279,76)	(31.635.800.105,39)	(1.881.865.174,37)	5,97
180						
181	POS LUAR BIASA					
182	BEBAN LUAR BIASA					
183	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
184	Beban Tidak Terduga		-	-	-	-
185	Beban Luar Biasa Lainnya		-	-	-	-
186	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA		-	-	-	-
187						
188	JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-	-	-
189						
190	SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL		(32.417.665.279,76)	(31.635.800.105,39)	(1.881.865.174,37)	5,97

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Periode Tanggal Laporan : 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

NO	URAIAN	2023	2022
1	Ekuitas Awal	31.227.826.485,87	32.010.895.117,92
2	Surplus/Defisit-LO	(33.417.865.279,76)	(31.535.800.105,39)
3	RK PPKD	33.655.380.470,00	29.902.790.981,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	849.941.392,34
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas PPKD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Setara kas		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Sekolah		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya		
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang		
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan Tahun Sebelumnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Persediaan dari Distribusi Antar SKPD		
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Investasi Non Permanen		
4.6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Investasi Non Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen		
4.7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Permanen		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Investasi Permanen		
4.8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	-	917.910.659,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		806.782.659,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap		108.128.000,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Aset Ekstrakomtable		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap		
4.9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	-	(67.969.266,66)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		(67.969.266,66)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan		
4.10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Mutasi dari Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Pemanfaatan		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Mutasi ke Aset Tetap		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Koreksi Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Pemanfaatan		
4.11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi		
4.12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Aset Lainnya		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Aset Lainnya		
4.13	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang		
4.14	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang		
4.15	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	-	-
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain		
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain		
5	Ekuitas Akhir	31.227.826.485,87	31.227.826.485,87





Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 1

PENDAHULUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

1.1.1. MAKSUD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah, bahwa setiap unit pemerintahan adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan secara periodik wajib menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah meliputi transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan atas transaksi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen.

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN.

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hal-hal yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi mengenai belanja, transfer, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan sebagai berikut :

a) Laporan Realisasi Anggaran. (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b) Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos Kas dan setara kas, Investasi jangka pendek, Piutang pajak dan bukan pajak, Persediaan, Investasi jangka panjang, Aset tetap, Kewajiban jangka pendek, Kewajiban jangka panjang, Ekuitas dana.

c) Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang terserminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d) Laporan Arus Kas. (LAK)

Laporan arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan nonanggaran.

e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

f) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis, setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang – Undang APBN / Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtiar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan –kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Negara
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jateng No. 120 tahun 2016 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
17. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 900/0016722 tahun 2023 tanggal 24 November 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diterbitkannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Disusul keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dilanjutkan dengan ditetapkan nya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas catatan Laporan keuangan

BAB 2.EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

BAB 3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB 4. KEBIJAKAN AKUNTASI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD.
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD.
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD.
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar akuntansi Pemerintah pada OPD.

BAB 5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

- 5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Penjelasan Pos – pos Pendapatan
 - 5.1.2. Penjelasan Pos – pos Belanja
 - 5.1.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2. Penjelasan Pos – Pos Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan - LO
 - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB 6. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB 7. PENUTUP.

Lampiran Tambahan



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Dinamika ekonomi dunia yang berubah cepat dengan diikuti oleh meruncingnya ketegangan geopolitik memperburuk prospek ekonomi serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini ditandai dengan mengemukanya 5 (lima) tantangan yang secara umum telah menurunkan prospek perekonomian dunia, meningkatkan divergensi investasi dan perdagangan antara Negara maju dan Negara berkembang, serta mendorong makin tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Berbagai tantangan tersebut menuntut penguatan kerja sama internasional baik skala multilateral maupun regional untuk memitigasi risiko sedini mungkin dampak rambatannya pada ketahanan perekonomian dan memperkuat pemulihan ekonomi global.

Optimisme pemulihan pada awal 2023 berangsur meredup. Kenaikan permintaan, khususnya di sektor jasa, setelah pulihnya mobilitas manusia pasca-Covid-19 menghadapi keterbatasan sisi penawaran karena dampak luka memar (scarring effect) di sisi korporasi maupun pembatasan imigrasi dari kebijakan politik di sejumlah negara maju (Advanced Economies, AEs). Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga meningkat dengan berlangsungnya perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan keterbatasan pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Berlanjutnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut, tetapi juga volume perdagangan dunia. Ketegangan Israel dan Palestina sejak awal Oktober 2023 menambah ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan juga dunia. Hal ini mengakibatkan proses pemulihan ekonomi global melambat, disertai dengan berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia, serta keketatan pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju. Perlambatan ekonomi dunia juga disebabkan oleh pengetatan moneter yang harus ditempuh bank-bank sentral untuk menurunkan inflasi, dengan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi di negara maju, khususnya AS. Melonjaknya utang pemerintah untuk membiayai ekspansi kebijakan fiskal di negara maju, khususnya AS, makin mendorong suku bunga dan kuatnya dolar AS di pasar keuangan global sehingga menarik aliran modal dunia dalam jumlah besar. Di negara Emerging Market and Developing Economies (EMDEs), otoritas moneter diharuskan memperkuat respons kebijakan untuk menjaga stabilitas eksternal dari dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk pembalikan aliran investasi portofolio dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar. Proses pemulihan ekonomi global juga dipengaruhi oleh permasalahan perubahan iklim, struktur demografi, dan digitalisasi. Cuaca ekstrem dingin di Eropa pada awal tahun makin memperburuk dampak terbatasnya pasokan energi dan pangan akibat perang Rusia di Ukraina terhadap pemulihan ekonomi di kawasan itu. Sementara itu, kawasan Asia dilanda kekeringan akibat El Nino sehingga mengharuskan otoritas memastikan pasokan dan ketahanan pangan untuk mengatasi dampaknya terhadap inflasi dan pemulihan ekonomi. Tuntutan dari negara maju untuk segera menurunkan emisi karbon dengan gerakan ekonomi-keuangan hijau makin mempersempit ruang gerak negara EMDEs, khususnya dalam mendorong pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi. Struktur demografi di banyak negara maju yang sebagian besar usia tua (aging population) kian memberikan beban pada anggaran fiskal pemerintahnya, sementara kenaikan

tabungan masyarakat makin terbatas. Negara EMDEs yang masih menikmati bonus demografi dari kalangan muda belum tentu dapat memanfaatkannya karena keterbatasan lapangan kerja maupun kemampuan teknis bekerja. Sementara itu, kecepatan digitalisasi di satu sisi memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seperti melalui digitalisasi UMKM, perbankan digital, dan financial technology (FinTech), kerja sama pembayaran antarnegara, teknologi blockchain dalam perdagangan internasional, hingga penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai aktivitas ekonomi-keuangan. Akan tetapi, di sisi lain, akselerasi digitalisasi juga menimbulkan permasalahan dengan maraknya perdagangan aset kripto, penggunaan AI dalam perdagangan pasar keuangan, hingga makin tingginya serangan siber. Kinerja dan prospek ekonomi global ke depan diwarnai oleh 5 (lima) karakteristik berikut ini yang perlu diwaspadai, diantisipasi, dan direspons secara tepat dengan penguatan sinergi kebijakan ekonomi nasional. Pertama, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melemah dan disertai divergensi pertumbuhan antarnegara yang makin melebar (*divergent slow growth*). Pemulihan ekonomi dunia diperkirakan akan memakan waktu yang lebih lama dan sulit untuk sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi Covid-19. Kedua, meningkatnya ketegangan geopolitik mendorong harga energi tetap tinggi dan harga pangan meningkat sehingga mengakibatkan lambatnya penurunan inflasi global (*gradual disinflation*). Ketiga, untuk mengendalikan inflasi yang masih tinggi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR), diperkirakan akan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher interest for longer*). Kenaikan suku bunga global diperkirakan akan diikuti pada tenor jangka panjang dengan kenaikan *yield obligasi pemerintah negara maju*, khususnya AS (US Treasury), akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, dan kenaikan premi risiko jangka panjang (*termpremia*). Keempat, berlanjutnya arus modal keluar dari negara EMDEs ke negara maju dan ke aset yang lebih likuid (*cash is the king*) karena tingginya suku bunga negara maju dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kelima, nilai tukar dolar AS yang masih akan tetap kuat (*strong dollar*) dan memberikan tekanan pelemahan terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk EMDEs. Ketidakpastian ekonomi dan keuangan global makin tinggi seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global terhadap ketahanan ekonomi domestik di negara-negara EMDEs, termasuk Indonesia.

Perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Perbaikan pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2023 terus berlanjut terutama ditopang oleh permintaan domestik, di tengah melambatnya kinerja sektor eksternal sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi permintaan domestik, konsumsi swasta tetap tumbuh kuat, termasuk konsumsi generasi muda, seiring dengan meningkatnya konsumsi di sektor jasa, masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Pertumbuhan investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Sementara di sisi eksternal, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara. Memasuki triwulan IV 2023, berbagai indikator terkini seperti penjualan eceran, indeks keyakinan konsumen, penjualan semen, dan Purchasing Manager's Index (PMI) yang berada pada zona ekspansi mengonfirmasi berlanjutnya

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetap baiknya pertumbuhan ekonomi juga tercermin pada kinerja lapangan usaha (LU) utama seperti industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan LU yang terkait dengan jasa termasuk transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, serta informasi dan telekomunikasi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,5-5,3% pada 2023, dan akan meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 dan 4,8-5,6% pada 2025. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). (*Bank Indonesia : laporan Perekonomian Indonesia 2023*)

Perekonomian Jawa Tengah berhasil tumbuh 4,98 persen sepanjang tahun 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen ini sedikit melambat bila dibandingkan perekonomian tahun 2022 yang tumbuh 5,3 persen. Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan menyebut bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022, ekonomi di triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 4,73 persen year on year (yoy). Menurut Dadang, dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi Jateng didorong hampir semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 16,25 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,41 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,24 persen. "Kalau dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) sebesar 7,34 persen," ujar Dadang.

Ditambahkan, secara struktur terlihat lapangan usaha industri pengolahan mendominasi ekonomi Jateng pada tahun kemarin dengan kontribusi hingga 34,03 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, didominasi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,90 persen. Dadang menjelaskan, struktur PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku secara kumulatif, sampai dengan Triwulan IV-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. "Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi lapangan usaha industri pengolahan sebesar 34,03 persen, diikuti perdagangan besar-eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,61 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,23 persen serta konstruksi sebesar 11,22 persen," kata Dadang.

Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jateng mencapai 72,09 persen. Sementara itu dari 17 lapangan usaha, masih terdapat dua lapangan usaha lain yang mengalami kontraksi. Tercatat kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh negatif sebesar -4,63 persen. Dikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang mengalami kontraksi sebesar -0,49 persen. Dadang menyebutkan, struktur PDRB Jateng menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jateng masih didominasi komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jateng sebesar 60,90 persen dan diikuti komponen ekspor barang dan jasa termasuk Ekspor Antar Daerah sebesar 37,28 persen (*Suara Merdeka, 20 Feb 2024*)

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Sedangkan misi sebagai penjabaran visi diatas adalah :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Selanjutnya visi dan misi tersebut diatas diimplementasikan ke dalam program kerja sebagai berikut :

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru mengaji;
3. Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan startup untuk wirausaha muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegritas;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur oleh raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mendukung kepada upaya pencapaian visi, misi, serta program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode kepemimpinan Tahun 2018-2023 yaitu pada misi keempat “Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan” dan program ke sembilan “Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel”.

Kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamisasikan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip-prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem

penyelenggaraan kearsipan Nasional yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan sistem kearsipan di daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan berkewajiban memberdayakan Lembaga Kearsipan dan Perpustakaan antara lain meningkatkan pelayanan arsip dan perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan penemuan lainnya kepada masyarakat. Untuk menunjang tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 3 Program dan 16 Kegiatan serta 31 Sub Kegiatan dengan mendapatkan dana APBD sebesar Rp 34.396.906.000,- yang terbagi menjadi Belanja Operasi Rp 33.632.716.000,- dan Belanja Modal Rp764.190.000,- sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023, program kegiatan yang dilaksanakan untuk menjawab permasalahan (Isu strategis) penanganan/pelayanan kearsipan dan perpustakaan, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam program-program yang dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Program (Non Urusan)

- Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

2. Program (Bidang Perpustakaan)

- Program Pembinaan Perpustakaan yang terdiri dari 4 kegiatan dan 8 Sub kegiatan.

3. Program (Bidang Kearsipan)

- Program Pengelolaan Arsip yang terdiri dari 5 kegiatan dan 4 Sub kegiatan.



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

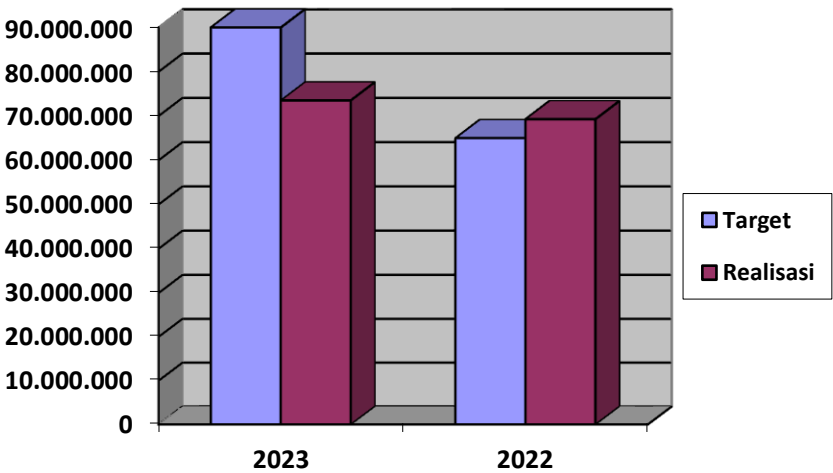
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM.

3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni (DPA) sebesar Rp 90.000.000,- dan sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 90.000.000,-

Capaian kinerja Penerimaan Asli Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sebagai sumber PAD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Realisasi Penerimaan Pendapatan retribusi selama tahun anggaran 2023 sebesar Rp 73.523.500,- atau 81,69 % dari target sebesar Rp 90.000.000,- sehingga ada kekurangan target sebesar Rp 16.476.500,- atau 18,31 % sedangkan perbandingan Capaian Kinerja Pendapatan tahun anggaran 2023 dengan tahun anggaran 2022 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1. sebagai berikut :

GAMBAR 1.
CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PENDAPATAN RETRIBUSI
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2022 (RIBUAN RUPIAH)



Grafik diatas menggambarkan bahwa pendapatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut :

Target pendapatan retribusi setelah perubahan tahun 2022 sebesar Rp 65.000.000,- sedangkan tahun 2023 sebesar Rp 90.000.000,- terdapat kenaikan target dibandingkan tahun 2022.

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi tahun 2022 sebesar Rp 69.276.500,- sedangkan tahun 2023 sebesar Rp 73.523.500,- sehingga mengalami kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 16.476.500,- atau 6,13 % dibandingkan tahun 2022.

Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Retribusi Tahun 2023 sebesar Rp 73.523.500,- atau 81,69 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan rincian sebagai berikut (lihat tabel 1).

Tabel 1
Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi TA 2023

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	90.000.000	70.773.500	78,64
a	Sewa Lahan Parkir	24.000.000	24.000.000	100,00
b	Sewa Gedung Kantin	18.000.000	22.620.000	125,67
c	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	18.500.000	7.912.500	42,77
d	Bebas Pinjam Peprustakaan	5.100.000	4.749.000	93,12
e	Fotocopy Arsip (mahasiswa)	7.500.000	3.927.800	52,37
f	Fotocopy Arsip (umum)	10.200.000	5.064.200	49,65
g	Reproduksi Arsip Foto	6.700.000	2.500.000	37,31
2	Penerimaan Lain-lain OPD	-	2.750.000	
	JUMLAH	90.000.000	73.523.500	81,69
	JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	90.000.000	73.523.500	81,69

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah kurang target yaitu sebesar 81,69 % atau Rp 73.523.500,- dari target sebesar Rp 90.000.000,- Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang telah ditetapkan,antara lain :

- a. Tahun 2023 pemakaian ruangan hitungan sewa nya berubah per meter³.
- b. Fotocopy arsip sudah tidak banyak pengguna arsip yang memanfaatkan dan pemustaka sudah banyak yang memanfaatkan fasilitas ebook.

3.1.2 CAPAIAN KINERJA BELANJA

Struktur Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp 37.425.318.000,- dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 34.396.906.000,- berkurang sebesar Rp. 3.028.412.000,- atau 8,11 persen Anggaran Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai DPA dan DPPA TA 2023 terdiri dari (Lihat tabel 2) :

Tabel 2
STRUKTUR BELANJA DAERAH
ANGGARAN MURNI DAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	MURNI	PERUBAHAN
1	BELANJA DAERAH	37.425.318.000	34.396.906.000
A	Belanja Operasi	36.661.628.000	33.632.716.000
	Belaja Pegawai (gaji dan tunjangan)	29.945.892.000	26.908.480.000
	Belanja Barang dan Jasa	6.715.736.000	6.724.236.000
B	Belanja Modal	763.690.000	764.190.000

Realisasi Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar 98,06 persen yaitu Realisasi Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp 33.728.903.970,- dari target yang dianggarkan sebesar Rp 34.396.906.000,- Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ditunjukan dalam tabel 3.

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023

No	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Daerah	34.396.906.000	33.728.903.970	98,06
	Belanja Operasi	33.632.716.000	32.967.187.797	98,02
	Belanja Pegawai	26.908.480.000	26.314.408.703	97,79
	Belanja Barang dan Jasa	6.724.236.000	6.652.779.094	98,94
2	Belanja Modal	764.190.000	761.716.173	99,68
	Belanja Modal	764.190.000	761.716.173	99,68
Jumlah Belanja Daerah		34.396.906.000	33.728.903.970	98,06

Perbandingan capaian kinerja belanja daerah tahun anggaran 2023 dan 2022 sebagai mana ditunjukan dalam tabel 4.

Tabel 4
Perbandingan realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

NO	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA 2023	TA 2022	Rp	%
	Belanja Daerah				
	Belanja Operasi	32.967.187.797	29.928.017.855	3.039.169.942	10,15
	Belanja Pegawai	26.314.408.703	25.451.471.122	862.937.581	3,39
	Belanja Barang dan Jasa	6.652.779.094	4.476.546.733	2.176.232.361	48,61
	Belanja Modal	761.716.173	44.048.726	717.667.447	1.630
	Belanja Modal	761.716.173	44.048.726	717.667.447	1.630
Jumlah		33.728.903.970	29.972.066.581	3.756.837.389	12,53

3.1.3 REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BELANJA BERDASARKAN SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

Dalam penyusunan pertanggungjawaban APBD berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka perlu dilakukan konversi semua realisasi belanja tersebut diatas, sesuai ketentuan SAP untuk itu realisasi belanja dikelompokan sesuai proporsi belanja sebagai mana ditunjukan dalam tabel 5 dan 6.

Tabel 5
Proporsi Belanja
Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Daerah			
	Belanja Operasional	33.632.716.000	32.967.187.797	98,02
2	Belanja Modal	764.190.000	761.716.173	99,68
Jumlah Belanja Daerah		34.396.906.000	33.728.903.970	98,06

Pada gambar tersebut diatas adalah Proporsi Belanja setelah dilakukan konversi yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp 33.728.903.970,- atau 98,06 persen dari anggaran sebesar Rp 34.396.906.000,- realisasi belanja terdiri dari: Belanja Operasional sebesar Rp 32.967.187.797,- atau 98,02 persen, sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 761.716.173,- atau 99,68 persen.

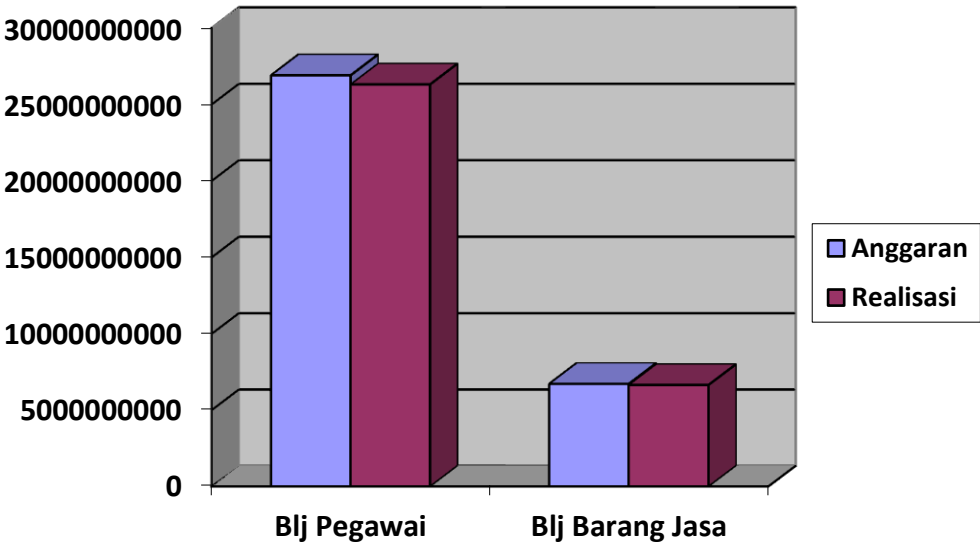
3.1.3.2 Capaian Target Kinerja Belanja Operasional.

Tabel 6
Proporsi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Operasional	26.908.480.000	26.314.408.703	97,79
	Belanja Pegawai	6.724.236.000	6.652.779.094	98,94
	Belanja Barang dan Jasa			
	Jumlah Belanja Operasional	33.632.716.000	32.967.187.797	98,02

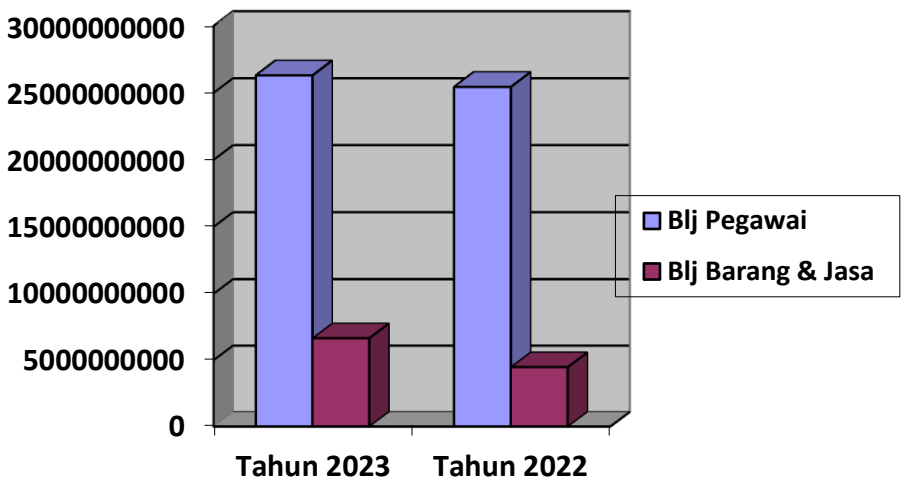
Realisasi Belanja Operasional tahun 2023 adalah sebesar Rp 32.967.187.797,- atau 98,02 persen dengan rincian sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp 26.314.408.703,- atau 97,79 persen, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 6.652.779.094,- atau 98,94 persen, Capaian Kinerja Belanja Operasional tahun anggaran 2022 dapat kami Gambarkan grafik dibawah ini (Gambar 2)

GAMBAR 2
PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
(DALAM RIBUAN RUPIAH)



Sedangkan Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Operasional Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Gambar Grafik dibawah ini (Gambar 3).

GAMBAR 3
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA BELANJA OPERASIONAL
TA 2023 DAN TA 2022
(DALAM RIBUAN RUPIAH)



Gambar 3 Adalah Perbandingan kinerja belanja operasional Tahun Anggaran 2023 dan 2022 ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 25.451.471.122,- dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 26.314.408.703,- ada **Kenaikan** sebesar Rp 862.937.581,- atau 3,39 persen.
- b. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 4.476.546.733,- dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.652.779.094,- ada **Kenaikan** sebesar Rp 2.176.232.361,- atau 48,61 persen.

3.1.3.2 Capaian Target Kinerja Belanja Modal.

Tabel 7
Capaian Kinerja Belanja Modal TA 2023

NO	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
1	Belanja Tanah	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	337.190.000	335.123.000	99.39
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	427.000.000	426.593.173	99,90
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	-	-	-
Jumlah		764.190.000	761.716.173	99,68

Tabel diatas menggambarkan Capaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 Realisasi sebesar Rp 761.716.173,- atau 99,68 persen dari Anggaran sebesar Rp 764.190.000,- sedangkan untuk masing-masing capaian kinerja belanja modal yang terdiri dari :

- a. Capaian Kinerja Belanja Peralatan dan Mesin Realisasi sebesar Rp 335.123.000,- atau 99.39 persen dari Anggaran sebesar Rp 337.190.000,-

- b. Capaian Kinerja Belanja Aset Tetap Lainnya Realisasi sebesar Rp 426.593.173,- atau 99,90 persen dari Anggaran sebesar Rp 427.000.000,-
- c. Capaian Kinerja Belanja Tanah, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Aset Tidak Berwujud sebesar **Nihil**.

Tabel 8
Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Modal TA 2022 dan 2023

NO	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/ (Turun)	
		TA 2023	TA 2022	Rp	%
1	Belanja Tanah	335.123.000	7.996.000	327.127.000	4.091
2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	426.593.173	36.052.726	390.540.447	1.083
6	Belanja Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
	Jumlah	761.716.173	44.048.726	717.667.447	1.629

Tabel 8 adalah Perbandingan Capaian Kinerja Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2023 ada **Kenaikan** sebesar 4.091 persen atau sebesar Rp 327.127.000,-
- b. Capaian Kinerja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2023 ada **Kenaikan** sebesar 1.083 persen atau sebesar Rp 390.540.447,-.
- c. Capaian Kinerja Belanja Tanah, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar **nihil**.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN.

Beberapa permasalahan kinerja pengelolaan belanja OPD dalam pelaksanaanya adalah sebagai berikut :

1. Pemustaka sudah banyak memanfaatkan fasilitas *e-book* sehingga denda keterlambatan sudah tidak ada.
2. Pengguna arsip dari kalangan mahasiswa tidak banyak menggunakan *scan / fotocopy* untuk bahan kuliah.
3. Pengunjung atau pengguna arsip dari kalangan umum hanya peneliti sehingga jumlah pengunjung sedikit.

Ikhtisar realisasi capaian target program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 34.396.906.000,- realisasi Rp 33.728.903.970,- atau 98,06 persen yang terdiri dari 3 program, 16 kegiatan dan 31 sub kegiatan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 9 :

TABEL 9
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD
TAHUN ANGGARAN 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Fungsi : Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Fungsi : Urusan Wajib
Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Jumlah		Realisasi		Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤96%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.565.528.000	31.914.896.652	100	98,00	
	Sekretariat – Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32.565.528.000	31.914.896.652	100	98,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.600.000	198.478.000	100	99,44	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	163.100.000	161.983.650	100	99,32	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.500.000	36.494.350	100	99,98	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.904.580.000	26.310.508.703	100	97,79	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.701.180.000	26.107.858.703	100	97,78	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	203.400.000	202.650.000	100	99,63	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	64.400.000	64.336.313	100	99,90	
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	64.400.000	64.336.313	100	99,90	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.026.800.000	1.025.971.684	100	99,92	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	100	100	
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000	119.991.856	100	99,99	
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.800.000	39.729.250	100	99,82	
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	23.000.000	23.000.000	100	100	
4.5	Penyediaan Bahan/Material	90.000.000	89.960.000	100	99,96	
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	209.000.000	208.984.238	100	99,99	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	530.000.000	529.306.340	100	99,87	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	336.190.000	334.633.000	100	99,54	
5.1	Pengadaan Mebel	175.000.000	175.000.000	100	100	
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.190.000	159.633.000	100	99,03	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.246.232.000	3.197.555.102	100	98,50	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100	100	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.123.632.000	1.085.955.728	100	96,65	
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	6.000.000	100	100	
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.106.600.000	2.095.599.374	100	99,48	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	787.726.000	783.413.850	100	99,45	
7.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	787.726.000	783.413.850	100	99,45	
B	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	227.973.000	227.973.000	100	100	
	Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	227.973.000	227.973.000	100	100	

1	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	112.200.000	112.200.000	100	100	
1.1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	112.200.000	112.200.000	100	100	
2	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	115.773.000	115.773.000	100	100	
2.1	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	115.773.000	115.773.000	100	100	
C	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	292.010.000	291.031.500	100	99,66	
	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	292.010.000	291.031.500	100	99,66	
1	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	292.010.000	291.031.500	100	99,66	
1.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	292.010.000	291.031.500	100	99,66	
D	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	226.080.000	210.524.000	100	93,12	
	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip	226.080.000	210.524.000	100	93,12	
1	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	226.080.000	210.524.000	100	93,12	
1.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	226.080.000	210.524.000	100	93,12	
E	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	207.175.000	207.074.390	100	99,95	
	Bidang Pengembangan Perpustakaan	207.175.000	207.074.390	100	99,95	
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	136.076.000	135.982.190	100	99,93	
1.1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	62.384.000	62.369.340	100	99,98	
1.2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	73.692.000	73.612.850	100	99,89	
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	71.099.000	71.092.200	100	99,99	
2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	61.939.000	61.932.200	100	99,99	
2.2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	9.160.000	9.160.000	100	100	
F	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	878.140.000	877.404.428	100	99,92	
	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	878.140.000	877.404.428	100	99,92	
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	878.140.000	877.404.428	100	99,92	
1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	106.030.000	105.908.275	100	99,89	
1.2	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	45.810.000	45.810.000	100	100	
1.3	Pengembangan Peprustakaan Deposit	242.300.000	242.193.430	100	99,96	
1.4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahasa Pustaka	484.000.000	483.492.723	100	99,90	
	JUMLAH	34.396.906.000	33.728.903.970	100	98,06	



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 diamanatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual, yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD adalah laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pada tahun 2005 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), peraturan ini berlaku untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk Laporan Keuangan. SAP menganut basis Kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, sedangkan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun Neraca dengan menggunakan basis akrual, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dengan pendekatan penyusunan Neraca berdasarkan basis akrual sedangkan penyusunan LRA dan LAK berdasarkan basis Kas.

4.1. ENTITAS AKUNTASI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, Catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban adalah setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2. BASIS DAN PRINSIP AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 menggunakan basis Kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, sedangkan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis tersebut dipilih untuk dapat menyusun Neraca dengan menggunakan basis akrual, basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dengan pendekatan penyusunan Neraca berdasarkan basis akrual sedangkan penyusunan LRA dan LAK berdasarkan basis Kas. Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi (OPD) terdiri dari: Laporan Realisasi anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk).

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

1. Pengertian Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara OPD,

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah,

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehan,

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh OPD terdiri dari :

a. Kas di kas daerah

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening kas daerah berdasarkan nilai nominal

b. Kas di bendahara pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab dikelola oleh Bendahara Pengeluaran / Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas PK yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/ pemegang kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal.

c. Kas di bendahara penerimaan

Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggungjawab dikelola oleh bendahara penerimaan, Kas di bendahara penerimaan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal. Kas di bendahara penerimaan berasal dari seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya baik penerimaan Kas, Transfer maupun Surat berharga

2. Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat :

a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan

b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah

3. Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4. Penyajian dan Pengungkapan.

Kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan LAK

Saldo Kas dari pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran dicatat sebagai kas dan setara kas lainnya dengan akun lawannya pendapatan ditangguhkan pada tahun anggaran berjalan (TAB). Dalam hal pengembalian belanja disetorkan pada tahun anggaran berikutnya maka OPD mencatat Pendapatan Lain-lain LRA atau Pendapatan Lain-lain LO.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,

Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang

1. Investasi Jangka Pendek

a. Pengertian Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

b. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerima hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang, dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

c. Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan, (Harga transaksi investasi di tambah biaya-biaya lain-lain yang berkaitan/timbul dalam rangka perolehan tersebut). Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito) dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut dan apabila dalam bentuk mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

d. Penyajian/Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di Neraca, sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO.

2. **Investasi Jangka Panjang.**

a. Pengertian Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu :

1. Investasi Permanen.

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali tapi untuk mendapatkan dividen/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah dan badan lainnya.

2. Investasi Non Permanen.

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali.

b. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria mempunyai manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.

c. Pengukuran

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah :

Metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

Metode Nilai bersih yang dapat direalisasikan, metode ini diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir

d. Penyajian/Pengungkapan

Investasi jangka panjang disajikan pada Neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurangan investasi jangka panjang non permanen. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar. Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui

sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada Neraca.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

1. Pengertian Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jenis-jenis piutang adalah sebagai berikut :

- a. Piutang Pendapatan,
- b. Belanja dibayar dimuka,
- c. Bagian lancar piutang jangka panjang,
- d. Bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), dan
- e. Piutang Lainnya.

2. Pengakuan

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintah dan kerugian daerah serta transaksi lainnya. Secara umum pengakuan piutang harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria ; telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan, dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

4. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan pada pos aset lancar di Neraca menurut jenis-jenis piutang, penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam Neraca dan sebagai pengurangan atas jumlah piutang.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

1. Pengertian Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan sifat pemakaiannya barang persediaan dapat terdiri dari :

- a. Bahan habis pakai;
- b. Bahan/Material.

2. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir, Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim

dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir periode pelaporan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik, inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

3. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya perolehan persediaan meliputi : Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan : Potongan harga dan rabat dan lainnya yang serupa

- a. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- b. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya, persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di Neraca pada bagian Aset Lancar.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP.

1. Pengertian Aset Tetap.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat

2. Jenis-jenis Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas sebagai berikut :

a. Tanah.

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan(memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan,Irigasi dan Jaringan.

Mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

e. Aset Tetap Lainnya.

Mencakup Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam katagori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

3. Pengakuan.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal, Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaanya berpindah.

4. Pengukuran

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau kontruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Komponen biaya perolehan
- b. Pengeluaran setelah tanggal perolehan
- c. Kontruksi dalam pengerjaan
- d. Perolehan secara gabungan
- e. Pertukaran
- f. Penyusutan
- g. Penghentian dan pelepasan
- h. Penilaian kembali
- i. Penyusunan Neraca awal

5. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

1. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

2. Pengakuan.

Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari Kas ke Dana Cadangan.

3. Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambahan Dana Cadangan.

4. Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK . Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya, kemudian ditambahkan dalam dana cadangan dengan mekanisme pembentukan dana cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut hal ini perlu diungkapkan dalam CaLK.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya antara lain :

1. Aset tak berwujud,
2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
3. Kemitraan dengan pihak ketiga;
4. Kas yang dibatasi penggunaannya; dan
5. Aset lain-lain.

1. ASET TAK BERWUJUD..

a. Pengertian Aset tak berwujud

Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- Aset non moneter yang dapat diidentifikasi,
- Dikendalikan oleh entitas pemerintah dan,
- Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan,

b. Pengakuan

Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi :

- 1) definisi dari aset tak berwujud; dan
- 2) kriteria pengakuan,

Sesuatu dapat diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

c. Pengukuran

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang dimiliki masa manfaat tak terbatas. Metode Amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus, metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama (rumus Nilai yang dapat disusutkan dibagi Masa manfaat)

d. Penghentian dan Pelepasan

Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian pada saatnya suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya, beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah atau berakhirnya masa manfaat aset tak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum penghentian aset tak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan Keuangan atas aset tak berwujud antara lain sebagai berikut :

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
- 2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa aset tak berwujud; dan
- 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan aset tak berwujud.

2. TAGIHAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

a. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah

Hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.

b. Pengakuan,

Tagihan tuntutan ganti rugi diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggungjawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

c. Pengukuran

Tagihan tuntutan ganti rugi diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

d. Pengungkapan

Tagihan tuntutan ganti rugi disajikan dalam Neraca sebagai bagian dari Aset Lainnya dan informasi yang perlu diungkapkan dalam CaLK.

3. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

a. Aset Kemitraan/Kerjasama

Aset kemitraan/kerjasama adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kemitraan/kerjasama. Masa kemitraan/kerjasama adalah jangka waktu dimana pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kemitraan/kerjasama.

b. Pengakuan

Aset kemitraan/kerjasama diakui pada saat terjadi perjanjian kemitraan/kerjasama, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan/kerjasama, setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kemitraan/kerjasama ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

c. Pengukuran

Aset yang diserahkan oleh pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan/kerjasama harus dicatat sebagai aset kemitraan/kerjasama sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau paling berdaya uji. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Aset kemitraan/kerjasama disajikan dalam Neraca sebagai aset lainnya. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam Neraca dalam klasifikasi aset tetap.

4. ASET LAIN-LAIN

a. Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

b. Pengakuan

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Aset lain-lain disajikan didalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan secara memadai didalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-

faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis asset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Pengertian Kewajiban Jangka pendek

Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan jenis-jenis kewajiban jangka pendek terdiri dari :

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pendapatan atau penerima iuran BPJS, Taspen dan Taperum.

2) Utang Bunga

Adalah kewajiban pemerintah atas beban bunga utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.

3) Bagian Lancar Utang Jangka panjang

Adalah bagian dari utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

4) Pendapatan Diterima di Muka

Adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/Jasa kepada pihak ketiga.

5) Utang Beban

Adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut.

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Adalah utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas.

b. Pengakuan

Secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban jangka pendek harus disajikan dalam Neraca dan CaLK.

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

a. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Pengakuan

Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran

Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan

Utang jangka panjang pemerintah harus diungkapkan dalam Neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam Neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK. Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi :

- Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberian pinjaman;
- Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang tersebut.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan perubahan Ekuitas, dan CaLK.

J. KEBIJAK AKUNTANSI PENDAPATAN.

1. PENDAPATAN – LO

a. Pendapat LO dan Pengakuan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan pemerintah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.
- 2) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan barang atau jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga.
- 3) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau asset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

b. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompilasikan dengan pengeluaran).

c. Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan;
- 2) Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila Realisasi pendapatan-LO dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
- 3) Disamping disajikan pada LO, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk darai pendapatan.

2. PENDAPATAN-LRA

a. Pengertian Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima direkening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapat BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan pada LRA dan LAK.

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah, apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

K. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN, BELANJA DAN TRANSFER

1. BEBAN.

a. Pengertian Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

b. Pengakuan dan Pengukuran

1) Beban Operasional

a) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b) Beban Barang dan Jasa

(1). Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurangan beban persediaan.

(2). Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(3). Beban Bunga Hutang

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah daerah untuk membayar bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah. Beban bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban Bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(4). Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

(5). Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi. Pada akhir tahun anggaran karena ketentuan perundang-undangan beban hibah tidak lagi disalurkan maka atas beban tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat disalurkan.

(6). Beban Bantuan Sosial

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh pihak ketiga. Pada akhir tahun anggaran karena ketentuan perundang-undangan beban bantuan sosial tidak lagi disalurkan maka atas beban tersebut dikoreksi sebesar yang tidak dapat disalurkan.

(7). Beban Penyusutan

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

(8). Beban Amortisasi

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan

(9). Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu :

a. Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui beban piutang tak tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b. Metode Penghapusan Langsung

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui beban piutang tak tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Beban piutang tak tertagih diukur dengan :

a. Metode Penyisihan Piutang

Beban piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

b. Metode Penghapusan Langsung

Beban piutang tak tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali

2) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

c. Penyajian dan Pengukuran

Beban disajikan dalam LO entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam CaLK sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

2. BELANJA

a. Pengertian Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Pengakuan dan Pengukuran Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan bendahara umum daerah.

Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) oleh BUD. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan asas bruto.

c. Penyajian dan Pengungkapan Belanja

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :

- 1) LRA sebagai pengeluaran daerah;
- 2) LAK masuk katagori aktivitas operasional;
- 3) LAK masuk katagori aktivitas investasi; dan
- 4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

3. TRANSFER.

a. Pengertian Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, antara lain bagi Hasil Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya serta Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

b. Pengakuan dan Pengukuran Transfer

Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari kas daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.

c. Penyajian dan Pengungkapan Transfer

Transfer keluar disajikan sebagai berikut :

- 1) LRA sebagai pengeluaran daerah,
- 2) LAK yang dimasukan dalam katagori Arus Kas Keluar dari aktivitas operasional; dan
- 3) CaLK

L. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN (PENERIMAAN/PENGELUARAN)

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Jenis-jenis Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dan cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3. Pengakuan

Penerimaan pembayaran diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembayaran oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.

4. Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5. Penyajian dan Pengungkapan

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA, LAK serta diungkapkan dalam CaLK. Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain :

- a. Informasi tentang rincian penerimaan pembiayaan;
- b. Informasi tentang rincian pengeluaran pembiayaan; dan
- c. Penjelasan mengenai selisih apabila nilai penerimaan/pengeluaran pembiayaan berbeda.

M. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI DAN PENGEMBALIAN

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada pemerintah daerah :

1. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LO atau akun beban.

4. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih.
5. Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun asset bersangkutan.
6. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas,, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
7. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.
8. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
9. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
11. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
12. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA OPD

Kebijakan Akuntansi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provisi Jawa Tengah mengacu pada Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 75 tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan Kebijakan akuntansi didasarkan pada :

1. Kerangka Konseptual akuntansi pemerintah, Pernyataan Standarisasi Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP),
2. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
3. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan,

Penerapan Kebijakan Akutansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan untuk entitas akuntansi terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO),
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023. Anggaran dan realisasi APBD TA 2023 adalah sebagai berikut:

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH Rp 73.523.500,00

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 73.523.500,- atau 81,69 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 69.276.500,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 4.247.000 atau 6,13 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Pendapatan Asli daerah	90.000.000	73.523.500	81,69	69.276.500	4.247.000
2 Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-	-
Jumlah	90.000.000	73.523.500	81,69	69.276.500	4.247.000

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 73.523.500,00

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 73.523.500,- atau 81,69 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 69.276.500,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 4.247.000 atau 6,13 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2 Pendapatan Retribusi Daerah	90.000.000	70.773.500	78,63	42.465.500	28.308.000
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	2.750.000	100	26.811.000	(24.061.000)
Jumlah	90.000.000	73.523.500	81,69	69.276.500	4.247.000

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah Rp 70.773.500,00

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 70.773.500,- atau 78,64 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 42.465.500,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 28.308.000,- atau 66,66%. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-
2 Retribusi Jasa Usaha	90.000.000	70.773.500	78,63	42.465.500	28.308.000
3 Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-
Jumlah	90.000.000	70.773.500	78,63	42.465.500	28.308.000

5.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp 70.773.500,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 70.773.500,- atau 78,64 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 42.465.500,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 28.308.000,- atau 66,66% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	90.000.000	70.773.500	78,63	42.465.500	28.308.000
2 Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-	-
3 Retribusi Terminal	-	-	-	-	-
4 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	-	-	-	-	-
5 Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-
6 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	-	-	-	-
7 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	-	-
8 Retribusi Penyeberangan di Air	-	-	-	-	-
9 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-
Jumlah	90.000.000	70.773.500	78,63	42.465.500	28.308.000

5.1.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 70.773.500,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp 90.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 70.773.500,- atau 78,64 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 42.465.500,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 28.308.000,- atau 66,66% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-
2 Retribusi Penyewaan Tanah	24.000.000	24.000.000	100	10.431.000	13.569.000
3 Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	-	-	-
4 Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	-	-	-	-
5 Retribusi Pemakaian Ruangan	18.000.000	22.620.000	125,67	15.000.000	7.620.000
5 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
6 Retribusi Pemakaian Alat	48.000.000	24.153.500	50,32	17.034.500	7.119.000
Jumlah	90.000.000	70.773.500	78,63	42.465.500	28.308.000

5.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 2.750.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar *Nihil* dengan realisasi sebesar Rp 2.750.000,- atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 26.811.000,- mengalami **penurunan** sebesar Rp 24.061.000,- atau 89,74 % dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-
5	Jasa Giro	-	-	-	-	-
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Bunga	-	-	-	-	-
8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	2.750.000	100	26.811.000	24.061.000
10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	-	-
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	-	-
15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-
16	Pendapatan BLUD	-	-	-	-	-
17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	-
19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
20	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	-	-	-
21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-	-
22	Pendapatan Zakat	-	-	-	-	-
23	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa	-	-	-	-	-
24	Pendapatan Lain-Lain SKPKD	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	2.750.000	100	26.811.000	24.061.000

5.1.1.2.1 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp 2.750.000,00

Pendapatan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain ditargetkan sebesar *Nihil* dengan realisasi sebesar Rp 2.750.000,- atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 26.811.000,- mengalami **penurunan** sebesar Rp 24.061.000,- atau 89,74 % dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Penerimaan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	2.750.000	100	26.811.000	24.061.000
Jumlah	-	2.750.000	100	26.811.000	24.061.000

5.1.2 BELANJA DAERAH Rp 33.728.903.970,00

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp 34.396.906.000,- dengan realisasi sebesar Rp 33.728.903.970,- atau 98,06%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 29.972.066.581,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 3.756.837.389,- atau 12,53 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Operasional	33.632.716.000	32.967.187.797	98,02	29.928.017.855	3.039.169.942
2 Belanja Modal	764.190.000	761.716.173	99,68	44.048.726	717.667.447
3 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
4 Belanja Transfer	-	-	-	-	-
Jumlah	34.396.906.00	33.728.903.97	98,06	29.972.066.581	3.756.837.389

5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL Rp 32.967.187.797,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp 33.632.716.000,- dengan realisasi sebesar Rp 32.967.187.797,- atau 98,02 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 29.928.017.855,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 3.039.169.942,- atau 10,15 % dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Pegawai	26.908.480.000	26.314.408.703	97,79	25.451.471.122	862.937.581
2 Belanja Barang dan Jasa	6.724.236.000	6.652.779.094	98,94	4.476.546.733	2.176.232.361
3 Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4 Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5 Belanja Hibah	-	-	-	-	-
6 Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
Jumlah	33.632.716.000	32.967.187.797	98,02	29.928.017.855	3.039.169.942

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp 26.314.408.703,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 26.908.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp 26.314.408.703,- atau 97,79 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 25.451.471.122,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 862.937.581,- atau 3,39% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.734.238.000	12.289.742.954	96,51	12.707.886.878	(418.143.924)
2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.966.942.000	13.818.115.749	98,93	12.533.815.244	1.284.300.505
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	207.300.000	206.550.000	99,64	209.769.000	(3.219.000)
4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-
5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-
6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-
7 Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-
8 Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-
Jumlah	26.908.480.000	26.314.408.703	97,79	25.451.471.122	862.937.581

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp 12.289.742.954,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp 12.734.238.000,- dengan realisasi sebesar Rp 12.289.742.954,- atau 96,51 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 12.707.886.878,- mengalami **penurunan** sebesar Rp 418.143.924,- atau 3,29% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	8.865.848.000	8.738.135.200	98,56	8.961.831.540	(223.696.340)
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	814.618.000	799.662.322	98,16	847.555.326	(47.893.004)
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	174.020.000	128.260.000	73,70	196.690.000	(68.430.000)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.217.512.000	1.150.132.000	94,47	1.155.224.000	(5.092.000)
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	153.580.000	149.360.000	97,25	146.575.000	2.785.000
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	457.856.000	440.965.380	96,31	449.293.680	(8.328.300)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	120.242.000	91.149.354	75,80	100.526.656	(9.377.302)
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	119.000	110.720	93,04	111.696	(976)
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	847.139.000	720.773.064	85,08	776.905.312	(56.132.248)
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	23.258.000	17.798.715	76,53	18.293.417	(494.702)
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	60.046.000	53.396.199	88,93	54.880.251	(1.484.052)
	Jumlah	12.734.238.000	12.289.742.954	96,51	12.707.886.878	(418.143.924)

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp 13.818.115.749,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp 13.966,942.000,- dengan realisasi sebesar Rp 13.818.115.749,- atau 98,93 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 12.533.815.244,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 1.284.300.505,-atau 10,25% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	13.966,942.000	13.818.115.749	98,93	12.533.815.244	1.284.300.505
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-
	Jumlah	13.966,942.000	13.818.115.749	98,93	12.533.815.244	1.284.300.505

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Rp 206.550.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp 207.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp 206.550.000,- atau 99,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 209.769.000,- mengalami **penurunan** sebesar Rp 3.219.000,- atau 1,53% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	-	-	-	-
4	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	-	-	-	-	-
5	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	-	-	-	-	-
6	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	-	-	-	-
7	Belanja Honorarium	207.300.000	206.550.000	99,64	209.769.000	3.219.000
8	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-
Jumlah		207.300.000	206.550.000	99,64	209.769.000	3.219.000

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 6.652.779.094,00

Belanja Barang dan Jasa Dianggarkan sebesar Rp 6.724.236.000,- dengan realisasi sebesar Rp 6.652.779.094,- atau 98,94%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 4.476.546.733,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.176.232.361,- atau 48,61% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Barang	1.204.463.000	1.203.514.909	99,92	557.663.792	645.851.117
2	Belanja Jasa	3.676.605.000	3.626.534.265	98,64	3.307.087.866	319.446.399
3	Belanja Pemeliharaan	611.226.000	607.710.150	99,42	219.416.000	388.294.150
4	Belanja Perjalanan Dinas	1.156.442.000	1.155.019.770	99,88	356.079.075	798.940.695
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.500.000	60.000.000	79,47	36.300.000	23.700.000
Jumlah		6.724.236.000	6.652.779.094	98,94	4.476.546.733	2.176.232.361

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang Rp 1.203.514.909,00

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp 1.204.463.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.203.514.909,- atau 99,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 557.663.792,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 645.851.117,- atau 115,81% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.204.463.000	1.203.514.909	99,92	557.663.792	645.851.117
2	Belanja Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-
3	Belanja Bahan/Material	-	-	-	-	-
4	Belanja Cetak/Penggandaan	-	-	-	-	-
5	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-
6	Belanja Barang Bekas dipakai	-	-	-	-	-
Jumlah		1.204.463.000	1.203.514.909	99,92	557.663.792	645.851.117

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa Rp 3.626.534.265,00

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp 3.676.605.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.626.534.265,- atau 98,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 3.307.087.866,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 319.446.399,- atau 9,66% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	3.413.477.000	3.374.162.428	98,85	3.219.621.123	154.541.305
2	Belanja Iuran Asuransi	112.628.000	102.355.837	90,88	75.966.743	26.389.094
3	Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-	-
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.000.000	11.000.000	100	6.000.000	5.000.000
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-
7	Belanja Sewa Alat Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
8	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	139.500.000	139.016.000	99,65	-	139.016.000
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi	-	-	-	5.500.000	(5.500.000)
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	-	-	-	-	-
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-
12	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.676.605.000	3.626.534.265	98,64	3.307.087.866	319.446.399

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan Rp 607.710.150,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp 611.226.000,- dengan realisasi sebesar Rp 607.710.150,- atau 99,42 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 219.416.000,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 388.294.150,- atau 176,97 % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287.726.000	285.679.150	99,29	159.616.000	126.063.150
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	293.500.000	292.031.000	99,50	59.800.000	232.231.000
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000	30.000.000	100	-	30.000.000
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
	Jumlah	611.226.000	607.710.150	99,42	219.416.000	388.294.150

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Rp 1.155.019.770,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp 1.156.442.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.155.019.770,- atau 99,88 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 356.079.075,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 798.940.695,- atau 224,37% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	968.437.000	967.708.430	99,92	356.079.075	611.629.355
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	188.005.000	187.311.340	99,63	-	187.311.340
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.156.442.000	1.155.019.770	99,88	356.079.075	798.940.695

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 60.000.000,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp 75.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp 60.000.000,- atau 79,47%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 36.300.000,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 23.700.000,- atau 39,5% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.500.000	60.000.000	79,47	33.300.000	26.700.000
2 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketigas/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	3.000.000	(3.000.000)
Jumlah	75.500.000	60.000.000	79,47	36.300.000	23.700.000

5.1.3 BELANJA MODAL Rp 761.716.173,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 764.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp 761.716.173,- atau 99,68%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 44.048.726,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 717.667.447,- atau 1.629,26% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.190.000	335.123.000	99,39	7.996.000	327.127.000
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	427.000.000	426.593.173	99,90	36.052.726	390.540.447
6 Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
7 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	-	-
8 Belanja Modal Komputer	-	-	-	-	-
Jumlah	764.190.000	761.716.173	99,68	44.048.726	717.667.447

5.1.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 335.123.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp 337.190.000,- dengan realisasi sebesar Rp 335.123.000,- atau 99,39%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 7.996.000,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 327.127.000,- atau 4.091,13% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	-	-
2 Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	-	-
3 Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	-	-
4 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-
5 Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-	-
6 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	179.600.000	179.562.000	99,98	3.996.000	175.566.000
7 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.660.000	4.660.000	100	-	4.660.000
8 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-
9 Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-	-
10 Belanja Modal Komputer	151.930.000	150.411.000	99	4.000.000	146.411.000
11 Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-
12 Belanja Modal Alat Pengeboran	1.000.000	490.000	49	-	490.000
13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	-
14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-
15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-
16 Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-	-
17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-
18 Belanja Modal Rambu-rambu	-	-	-	-	-
19 Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-
20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-	-
Jumlah	337.190.000	335.123.000	99,39	7.996.000	327.127.000

5.1.3.1.1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 179.562.000,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp 179.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp 179.562.000,- atau 99,98 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 3.996.000,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 175.566.000,- atau 4.393,54% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	3.996.000	(58.704.000)
2 Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.600.000	4.562.000-	100	-	4.562.000-
3 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	175.000.000	175.000.000	100	-	175.000.000
Jumlah	179.600.000	179.562.000	99,98	3.996.000	175.566.000

5.1.3.1.2 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 4.660.000,-

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp 4.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.660.000,- atau 100 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar **nihil** mengalami **kenaikan** sebesar Rp 4.660.000,- atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.660.000	4.660.000	100	-	4.660.000
Jumlah	4.660.000	4.660.000	100	-	4.660.000

5.1.3.1.3 Belanja Modal Komputer Rp150.411.000,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp 151.930.000,- dengan realisasi sebesar Rp 150.411.000,- atau 99 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 4.000.000,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 146.411.000,- atau 3.660,3% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Komputer Unit	146.930.000	146.461.000	99,68	-	146.461.000
2 Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000	3.950.000	79	4.000.000	(50.0000)
Jumlah	151.930.000	150.411.000	99	4.000.000	146.411.000

5.1.3.1.4 Belanja Modal Alat Pengeboran Rp 490.000,-

Belanja Modal Alat Pengeboran dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 490.000,- atau 49 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar **nihil** mengalami **kenaikan** sebesar Rp 490.000,- atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Bor Mesin Putar	10.000.000	4.660.000	100	-	4.660.000
Jumlah	10.000.000	4.660.000	100	-	4.660.000

5.1.3.2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 426.593.173,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp 427.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 426.593.173,- atau 99,90 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 36.052.726,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 390.540.447,- atau 1.083,25% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan	427.000.000	426.593.173	99,90	36.052.726	390.540.447
Jumlah	427.000.000	426.593.173	99,90	36.052.726	390.540.447

5.1.3.2.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp 426.593.173,00

Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp 427.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 426.593.173,- atau 99,90 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 36.052.726,- mengalami **kenaikan** sebesar Rp 390.540.447,- atau 1.083,25% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	302.500.000	302.368.040	99,96	36.052.726	266.315.314
2 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	124.500.000	124.225.133	99,78	-	124.225.133
3 Belanja Modal Kartografi,Naskah, Dan Lukisan Lainnya	-	-	-	-	-
4 Belanja Modal Musik	-	-	-	-	-
5 Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Material) Lainnya"	-	-	-	-	-
6 Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-	-	-	-
7 Belanja Modal Tarscalt	-	-	-	-	-
Jumlah	427.000.000	426.593.173	99,90	36.052.726	390.540.447

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET Rp 31.465.541.676,11

Total Aset sebesar Rp 31.465.541.676,11 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 31.227.826.485,87 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 237.715.190,24 atau 0,76%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Aset Lancar	56.613.001,62	947.750,00
2 Investasi Jangka Panjang	-	-
3 Aset Tetap	31.408.928.674,49	31.226.878.735,87
4 Dana Cadangan	-	-
5 Aset Lainnya	-	-
Jumlah	31.465.541.676,11	31.227.826.485,87

5.2.1.1 ASET LANCAR Rp 56.613.001,62

Aset Lancar sebesar Rp 56.613.001,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 947.750 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 56.613.001,62 atau 5873,41% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Kas dan Setara Kas	-	-
2 Investasi Jangka Pendek	-	-
3 Piutang Pajak Daerah	-	-
4 Piutang Retribusi Daerah	-	-
5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	-
7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
8 Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9 Piutang Lainnya	-	-
10 Penyisihan Piutang	-	-
11 Beban Dibayar Dimuka	(10.693.501,62)	-
12 Persediaan	(45.919.500,00)	947.750,00
Jumlah	56.613.001,62	947.750,00

5.2.1.1.1 **Beban Dibayar Dimuka Rp 10.693.501,62**

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 10.693.501,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar *Nihil* mengalami **kenaikan** sebesar Rp 10.693.501,62 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Beban Dibayar Dimuka	10.693.501,62	-
2 Beban Dibayar Dimuka-Sewa	-	-
Jumlah	10.693.501,62	-

5.2.1.1.2 **Persediaan Rp 45.919.500**

Persediaan sebesar Rp 45.919.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 947.750 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 44.971.750 atau 4745,11% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Barang Pakai Habis	45.919.500	947.750
2 Barang Tak Habis Pakai	-	-
3 Barang Bekas Dipakai	-	-
Jumlah	45.919.500	947.750

5.2.1.1.2.1 **Barang Pakai Habis Rp 45.919.500**

Barang Pakai Habis sebesar Rp 45.919.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 947.750 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 44.971.750 atau 4745,11% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Bahan	-	-
2 Suku Cadang	-	-
3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	45.919.500	947.750
4 Obat-Obatan	-	-
5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-
6 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
7 Natura dan Pakan	-	-
Jumlah	45.919.500	947.750

5.2.1.1.2.1.1 **Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp 947.750**

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp 45.919.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 947.750 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 44.971.750 atau 4745,11% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Alat Tulis Kantor	35.472.500	-
2 Kertas dan Cover	5.699.000	-
3 Bahan Cetak	2.628.000	-
4 Benda Pos	-	-
5 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-
6 Bahan Komputer	2.120.000	947.750
7 Perabot Kantor	-	-
8 Alat Listrik	-	-
9 Perlengkapan Dinas	-	-
10 Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-
11 Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-
12 Suvenir/Cendera Mata	-	-
13 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
Jumlah	45.919.500	947.750

5.2.1.2 **Aset Tetap Rp 31.408.928.674,49**

Aset Tetap sebesar Rp 31.408.928.674,49 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 31.226.878.735,87 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 182.049.938,62 atau 0,58% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Tanah	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
2 Peralatan dan Mesin	36.307.825.761,00	35.461.772.261,00
3 Gedung dan Bangunan	23.062.733.817,00	23.062.733.817,00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	206.975.000,00	206.975.000,00
5 Aset Tetap Lainnya	14.075.390.408,00	13.620.007.035,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	133.276.000,00	133.276.000,00

7	Akumulasi Penyusutan	(46.923.772.311,51)	(45.804.385.377,13)
	Jumlah	31.408.928.674,49	31.226.878.735,87

5.2.1.2.1 Tanah Rp 4.546.500.000,00

Tanah sebesar Rp 4.546.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4.546.500.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Tanah Persil	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
2 Tanah Non Persil	-	-
3 Lapangan	-	-
Jumlah	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00

5.2.1.2.1.1 Tanah Persil Rp 4.546.500.000,00

Tanah Persil sebesar Rp 4.546.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4.546.500.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	-	-
2 Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-
3 Tanah untuk Bangunan Industri	-	-
4 Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
5 Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	-	-
6 Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	-	-
7 Tanah Persil Lainnya	-	-
Jumlah	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin Rp 36.307.825.761

Peralatan dan Mesin sebesar Rp 36.307.825.761 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 35.461.772.261 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 846.053.500,00 atau 2,39% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Alat Besar	4.065.823.260,00	-
2 Alat Angkutan	5.890.636.345,00	5.470.636.345,00
3 Alat Bengkel dan Ukur	2.056.129.956,00	2.056.129.956,00
4 Alat Pertanian	-	-
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.734.463.498,00	13.536.986.998,00
6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.691.826.256,00	4.687.166.256,00
7 Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8 Alat Laboratorium	90.230.000,00	90.230.000,00
9 Alat Persenjataan	-	-
10 Komputer	5.778.716.446,00	5.554.799.446,00
11 Alat Eksplorasi	-	-
12 Alat Pengeboran	-	-
13 Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurniaan	-	-
14 Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15 Alat Keselamatan Kerja	-	-
16 Alat Peraga	-	-
17 Peralatan Proses/Produksi	-	-
18 Rambu-Rambu	-	-
19 Peralatan Olahraga	-	-
Jumlah	36.307.825.761,00	35.461.772.261,00

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan Rp 23.062.733.817

Gedung dan Bangunan sebesar Rp 23.062.733.817 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 23.062.733.817,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Bangunan Gedung	22.719.853.147,00	22.719.853.147,00
2 Monumen	-	-
3 Bangunan Menara	-	-
4 Tugu Titik Kontrol/Pasti	342.880.670,00	342.880.670,00
Jumlah	23.062.733.817,00	23.062.733.817,00

5.2.1.2.4 **Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 206.975.000,00**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 206.975.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 206.975.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Jalan dan Jembatan	-	-
2 Bangunan Air	190.275.000,00	190.275.000,00
3 Instalasi	-	-
4 Jaringan	16.700.000,00	16.700.000,00
Jumlah	206.975.000,00	206.975.000,00

5.2.1.2.5 **Aset Tetap Lainnya Rp 14.075.390.408**

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 14.075.390.408 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 13.620.007.035 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 455.383.373 atau 3,34% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan	14.065.351.837,00	13.609.968.464,00
2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	10.038.571,00	10.038.571,00
3 Hewan	-	-
4 Biota Perairan	-	-
5 Tanaman	-	-
6 Barang Koleksi Non Budaya	-	-
7 Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
Jumlah	14.075.390.408,00	13.620.007.035,00

5.2.1.2.6 **Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 133.276.000,00**

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp 133.276.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 133.276.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Konstruksi Dalam Pengerjaan	133.276.000,00	133.276.000,00
2 Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	-	-
3 Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	-	-
4 Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	-	-
5 Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	133.276.000,00	133.276.000,00

5.2.1.2.7 **Akumulasi Penyusutan Rp 46.923.772.311,51**

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 46.923.772.311,51 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 45.804.385.377,13 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 1.119.386.934,38 atau 2,44% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(34.596.464.416,63)	(33.963.763.465,10)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12.219.048.781,98)	(11.738.611.750,74)
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(108.259.112,90)	(102.010.161,29)
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah	(46.923.772.311,51)	(45.804.385.377,13)

5.2.1.5.1 **Aset Tidak Berwujud Rp 193.550.000**

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 193.550.000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 193.550.000 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Goodwill	-	-
2 Lisensi dan Franchise	-	-
3 Hak Cipta	-	-
4 Hak Paten	-	-
5 Software	193.550.000,00	193.550.000,00

6	Kajian	-
7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-
8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-
Jumlah		193.550.000,00
		193.550.000,00

5.2.1.5.2 Aset Lain-Lain Rp 1.498.028.824,00

Aset Lain-Lain sebesar Rp 1.498.028.824,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.498.028.824,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Aset Rusak Berat/Usang	1.498.028.824,00	1.498.028.824,00
2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-
3 Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-
Jumlah	1.498.028.824,00	1.498.028.824,00

5.2.1.5.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp 193.550.000

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 193.550.000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 193.550.000 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	-	-
2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(193.550.000,00)	(193.550.000,00)
5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	-	-
Jumlah	(193.550.000,00)	(193.550.000,00)

5.2.1.5.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp 1.498.028.824,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp 1.498.028.824,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.498.028.824,00 mengalami tidak **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Sewa	-	-
2 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Kerja Sama Pemanfaatan	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-
5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	(1.498.028.824,00)	(1.498.028.824,00)
Jumlah	(1.498.028.824,00)	(1.498.028.824,00)

5.2.2 KEWAJIBAN Rp,00

Kewajiban sebesar **Nihil**, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Nihil** mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar **Nihil** atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Kewajiban Jangka Pendek	-	-
2 Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah	Nihil	Nihil

5.2.3 EKUITAS Rp Rp 31.465.541.676,16

Ekuitas sebesar Rp 31.465.541.676,16 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 31.227.826.485,87 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 237.715.190,29 atau 0,76% dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1 Ekuitas	31.465.541.676,16	32.860.836.510,26
2 Ekuitas SAL	-	-
3 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	-	-
Jumlah	31.465.541.676,16	32.860.836.510,26

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2		3	5
1	Pendapatan	613.734.200,00	196.776.300,00	416.957.900
2	Beban	32.912.012.545,33	30.069.204.042,47	2.842.808.502,86
	Surplus/(Defisit) Operasional	(33.417.665.279,71)	(31.535.800.105,39)	1.881.865.174,32
3	Kegiatan Non Operasional	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(33.417.665.279,71)	(31.535.800.105,39)	1.881.865.174,32
4	Pos Luar Biasa	-	-	-
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	(33.417.665.279,71)	(31.535.800.105,39)	1.881.865.174,32

5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO Rp 613.734.200

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp 613.734.200 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 196.776.300 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 416.957.900 atau 211,89% dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	73.523.500	540.210.700	-	73.523.500	69.276.500	4.247.000	6,13
2 Pendapatan Transfer-LO	-	-	-	-	-		
3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	-	-	-	540.210.700	127.499.800	412.710.900	323,69
Jumlah	73.523.500	540.210.700	-	613.734.200	196.776.300	416.957.900	211,894

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Rp 73.523.500

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO terealisasi sebesar Rp 73.523.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 69.276.500 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 4.247.000 atau 6,13% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	70.773.500	-	-	70.773.500	42.465.500	28.308.000	66,66
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	2.750.000	-	-	2.750.000	26.811.000	(24.061.000,00)	(89,74)
	Jumlah	73.523.500	-	-	73.523.500	69.276.500	4.247.000	6,13

5.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp 70.773.500

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp 70.773.500 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 42.465.500 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 28.308.000 atau 66,66% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO	-	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO	70.773.500	-	-	70.773.500	42.465.500	28.308.000	66,66
3	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	70.773.500	-	-	70.773.500	42.465.500	28.308.000	66,66

5.3.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Rp 2.750.000

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp 2.750.000, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 26.811.000 mengalami **penurunan** sebesar Rp 24.061.000 atau 89,74 % dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-	-	-	-
2	Jasa Giro-LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Bunga-LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan atas Potongan, atau Bentuk Lain - LO	2.750.000	-	-	2.750.000	26.811.000	(24.061.000,00)	(89,74)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	-	-	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
9	Pendapatan dari Pengembalian-LO	-	-	-	-	-	-	-
10	Pendapatan BLUD-LO							
	Jumlah	2.750.000	-	-	2.750.000	26.811.000	(24.061.000,00)	(89,74)

5.3.1.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO Rp 540.210.700,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp 540.210.700 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 127.499.800 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 412.710.900 atau 323,69% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah-LO	-	540.210.700		540.210.700	127.499.800	412.710.900	323,69
2	Dana Darurat-LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	540.210.700		540.210.700	127.499.800	412.710.900	323,69

5.3.1.2.1 Pendapatan Hibah-LO Rp,00

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp 540.210.700 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 127.499.800 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 412.710.900 atau 323,69% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	-	540.210.700		540.210.700	127.499.800	412.710.900	323,69
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	-	-	-	-	-	-	-
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	540.210.700		540.210.700	127.499.800	412.710.900	323,69

5.3.2 BEBAN DAERAH Rp 32.912.012.545,33

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp 32.912.012.545,33 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 31.732.576.405,39 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 1.179.436.139,94 atau 3,72% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Operasional	32.967.187.797	1.120.824.684,38	56.613.001,67	32.912.012.545,33	31.732.576.405,39	1.179.436.139,94	3,72
2 Beban Transfer	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	32.967.187.797	1.120.824.684,38	56.613.001,67	32.912.012.545,33	31.732.576.405,39	1.179.436.139,94	3,72

5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL Rp 34.031.399.479,71

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp 34.031.399.479,71 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 31.732.576.405,39 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.298.823.074,32 atau 7,24% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Pegawai	26.314.408.703	-	-	26.314.408.703	25.451.471.122	862.937.581	3,39
2 Beban Barang dan Jasa	6.652.779.094	1.437.750	56.613.001,67	6.597.603.842,33	4.617.732.920,47	1.979.870.921,86	42,88
3 Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4 Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
5 Beban Hibah	-	-	-	-	-	-	-
6 Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
7 Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-	-
8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	1.119.386.934,38	-	1.119.386.934,38	1.663.372.362,92	(543.985.428,54)	(32,70)
9 Beban Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	32.967.187.797	1.120.824.684,38	56.613.001,67	32.912.012.545,33	31.732.576.405,39	2.298.823.074,32	7,24

5.3.2.1.1 Beban Pegawai Rp 26.314.408.703

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp 26.314.408.703 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 25.451.471.122 mengalami kenaikan sebesar Rp 862.937.581 atau 3,39% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN	12.289.742.954	-	-	12.289.742.954	12.707.886.878	(418.143.924)	(3,29)
2 Beban Tambahan Penghasilan ASN	13.818.115.749	-	-	13.818.115.749	12.533.815.244	1.284.300.505	10,25
3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	206.550.000	-	-	206.550.000	209.769.000	(3.219.000)	(1,53)
4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-	-
5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Gaji dan Tunjangan MRP	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	-
9	Beban Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	26.314.408.703	-	-	26.314.408.703	25.451.471.122	862.937.581	3,39

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp 6.597.603.842,33

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp 6.597.603.842,33 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 4.617.732.920,47 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 1.979.870.921,86 atau 42,88% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang	1.203.514.909	1.437.750	45.919.500,00	1.159.033.159,00	665.684.977,00	493.348.182,00	74,11
2	Beban Jasa	3.626.534.265		10.693.501,67	3.615.840.763,33	3.338.397.001,80	277.443.761,53	8,31
3	Beban Pemeliharaan	607.710.150	-	-	607.710.150,00	221.271.866,67	386.438.283,33	174,64
4	Beban Perjalanan Dinas	1.155.019.770	-	-	1.155.019.770,00	356.079.075,00	798.940.695,00	224,37
5	Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000	-	-	60.000.000,00	36.300.000	23.700.000	65,29
6	Beban Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.652.779.094	1.437.750	56.613.001,67	6.597.603.842,33	4.617.732.920,47	1.979.870.921,86	42,88

5.3.2.1.2.1 Beban Barang Rp 1.159.033.159

Beban Barang terealisasi sebesar Rp 1.159.033.159,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 665.684.977 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 493.348.182,00 atau 74,11% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023(Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang Pakai Habis	1.203.514.909	947.750	45.919.500	1.158.543.159	665.684.977,00	492.858.182	74,04
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Barang Bekas Dipakai	-	490.000	-	490.000	-	490.000	-
	Jumlah	1.203.514.909	1.437.750	45.919.500	1.159.033.159,00	665.684.977,00	493.348.182,00	74,11

5.3.2.1.2.2 **Beban Jasa Rp 3.615.840.763,33**

Beban Jasa terealisasi sebesar 3.615.840.763,33 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 3.338.397.001,80 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 277.443.761,53 atau 8,31% dengan rincian sebagai berikut

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Jasa Kantor	3.374.162.428	-	-	3.374.162.428,00	3.219.621.123,00	154.541.305,00	4,80
2	Beban Jasa Asuransi	102.355.837	-	10.693.501,67	91.662.335,33	107.275.878,80	(15.613.543,47)	(14,55)
3	Beban Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	11.000.000	-	-	11.000.000	6.000.000	5.000.000	83,33
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	139.016.000	-	-	139.016.000	-	139.016.000	-
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	-	5.500.000	(5.500.000)	(100)
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-	-	-	-	-	-	-
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-	-
13	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	-	-	-	-	-	-	-
14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	-	-	-	-	-	-	-
15	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.626.534.265		10.693.501,67	3.615.840.763,33	3.338.397.001,80	277.443.761,53	8,31

5.3.2.1.2.3 **Beban Pemeliharaan Rp 607.710.150**

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp 607.710.150 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 221.271.866,67 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 386.438.283,33 atau 174,64 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	285.679.150			285.679.150	159.616.000,00	124.207.283,33	76,92
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	292.031.000			292.031.000	59.800.000,00	232.231.000	388,35
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000	-	-	30.000.000	-	30.000.000	-
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	607.710.150	-	-	607.710.150	221.271.866,67	386.438.283,33	174,64

5.3.2.1.2.4 **Beban Perjalanan Dinas Rp 1.155.019.770**

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp 1.155.019.770 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 356.079.075 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 798.940.695 atau 224,37% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023(Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	967.708.430	-	-	967.708.430	356.079.075	611.629.355	171,77

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023(Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
2 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	187.311.340	-	-	187.311.340	-	187.311.340	
Jumlah	1.155.019.770	-	-	1.155.019.770	356.079.075	798.940.695,00	224,37

5.3.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 60.000.000

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp 60.000.000 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 36.300.000 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 23.700.000 atau 65,29% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2023 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2023 Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000	-	-	60.000.000	33.300.000,00	26.700.000	80,18
2 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000	(100)
Jumlah	60.000.000	-	-	60.000.000	36.300.000,00	23.700.000	65,29

5.3.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp 1.119.386.934,38

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp 1.119.386.934,38 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.663.372.362,92 mengalami **penurunan** sebesar Rp 543.985.428,54 atau 32,70% dengan rincian sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	632.700.951,53	1.176.686.380,11	(543.985.428,58)	(46,23)
2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	480.437.031,24	480.437.031,20	0,04	0,00
3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.248.951,61	6.248.951,61	-	-
4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
5 Beban Penyusutan Aset Lainnya- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-
Jumlah	1.119.386.934,38	1.663.372.362,92	(543.985.428,54)	(32,70)

5.3.2.2.1 BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN Rp 632.700.951,53

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 632.700.951,53 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.176.686.380,11 mengalami **penurunan** sebesar Rp 543.985.428,58 atau 46,23% dengan rincian sebagai berikut:

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Besar	-	96.425.000,00	(96.425.000,00)	(100,00)
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan	148.033.437,50	219.128.875,00	(71.095.437,50)	(32,44)
3 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	141.544.255,70	263.436.135,50	(121.891.879,80)	(46,27)
4 Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	-
5 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	231.004.748,33	265.473.496,64	(34.468.748,31)	(12,98)
6 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	29.232.980,00	145.497.588,80	(116.264.608,80)	(79,91)
7 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
8 Beban Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-
9 Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	-	-
10 Beban Penyusutan Komputer	82.885.530,00	186.725.284,17	(103.839.754,17)	(55,61)
11 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12 Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	-
13 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-
14 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
16 Beban Penyusutan Alat Peraga	-	-	-	-

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
18	Beban Penyusutan Rambu-rambu	-	-	-	-
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-	-
	Jumlah	632.700.951,53	1.176.686.380,11	(543.985.428,58)	(46,23)

5.3.2.2.2 BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN Rp 480.437.031,24

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 480.437.031,24 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 480.437.031,20 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 0,04 dengan rincian sebagai berikut:

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	473.305.295,58	473.305.295,53	0,05	0,00
2	Beban Penyusutan Monumen	-	-	-	-
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.131.735,66	7.131.735,67	(0,01)	-
	Jumlah	480.437.031,24	480.437.031,20	0,04	0,00

5.3.2.2.3 BEBAN PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI Rp 6.248.951,61

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi terealisasi sebesar Rp 6.248.951,61 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6.248.951,61 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	5.831.451,61	5.831.451,61	-	-
3	Beban Penyusutan Instalasi	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Jaringan	417.500,00	417.500,00	-	-
	Jumlah	6.248.951,61	6.248.951,61	-	-

5.3.3 SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL

Surplus Defisit Non Operasional terealisasi sebesar *Nihil* , apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar *Nihil* mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut:

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Surplus Non Operasional	-	-	-	-
2	Defisit Non Operasional	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

5.3.3.1 SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Non Operasional terealisasi sebesar *Nihil*, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar *Nihil* mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar *Nihil* atau % dengan rincian sebagai berikut :

		2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya – LO	-	-	-	-
	Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5.3.3.2 DEFISIT NON OPERASIONAL Rp,00

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar Rp,00 atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
-2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.3.4 BEBAN LUAR BIASA

Beban Luar Biasa terealisasi sebesar **Nihil**, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Nihil** mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar **Nihil** atau % dengan rincian sebagai berikut :

	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Tidak Terduga	-	-	-	-
2 Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	31.227.826.485,87	32.010.895.117,92	(783.068.632,05)	(2,45)
2	Surplus/Defisit-LO	(33.417.665.279,76)	(31.535.800.105,39)	(64.953.465.385,10)	205,97
3	RK-PPKD	33.655.380.470,00	29.902.790.081,00	3.752.590.389,00	12,55
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	-	849.941.392,34	(849.941.392,34)	(100,00)
	Ekuitas Akhir	31.465.541.676,11	31.227.826.485,87	237.715.190,29	0,761

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp 31.227.826.485,87 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit – LO sebesar (33.417.665.279,71) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2023.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar **Nihil**, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreks/Penyesuaian Kas	-	-	-	-
2	Koreks/Penyesuaian Piutang	-	-	-	-
3	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	-	-	-
4	Koreks/Penyesuaian Persediaan	-	-	-	-
5	Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-	-	-
6	Koreks/Penyesuaian	-	-	-	-

	Penyisihan Investasi Non Permanen				
7	Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-	-	-
8	Koreks/Penyesuaian Aset Tetap	-	917.910.659,00	917.910.659,00	-
9	Koreks/Penyesuaian Penyusutan	-	(67.969.266,66)	(67.969.266,66)	-
10	Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-	-	-
11	Koreks/Penyesuaian Amortisasi	-	-	-	-
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
13	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	-	-	-	-
14	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
15	Koreks/Penyesuaian Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah		-	849.941.392,34	849.941.392,34	-

5.4.3.1 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar **Nihil** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
2	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	809.782.659,00	809.782.659,00	-
3	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	-	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	108.128.000,00	108.128.000,00	-
8	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-	-	-
9	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
10	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	-	-	-	-
11	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	-	-	-	-
Jumlah		-	917.910.659,00	917.910.659,00	

5.4.3.2 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar **Nihil** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	-	(67.969.266,66)	(67.969.266,66)	-
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	-	-	-	-
Jumlah		-	(67.969.266,66)	(67.969.266,66)	-

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp 31.465.541.676,11 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	31.465.541.676,11	31.227.826.485,87	237.715.190,24	0,76
Jumlah		31.465.541.676,11	31.227.826.485,87	237.715.190,24	0,76



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Tengah terletak pada 5° 4" dan 8° 30" lintang selatan dan 108° 30" dan 111° 30" bujur timur. Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3.25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan wilayah laut dengan garis pantai sepanjang 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Sedangkan secara administrative Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota serta 567 kecamatan yang meliputi 7.807 desa dan 763 kelurahan.

Pembangunan di Jawa Tengah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional yang menyangkut aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pembangunan Ideologi dan Politik dilakukan melalui pendalaman Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pendidikan politik masyarakat dalam berdemokrasi guna menumbuhkan semangat kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah telah dilakukan berbagai langkah antara lain :

1. Regulasi untuk mendorong peningkatan investasi dan stabilisasi sektor keuangan;
2. Pengembangan pertanian dalam arti luas;
3. Mendorong pertumbuhan UMKM; dan
- Menciptakan iklim kondusif.

6.2. TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

2. Fungsi

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, akuisisi dan pengolahan, pelestarian dan preservasi, layanan dan pemasyarakatan serta pengembangan dan hubungan antar lembaga lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan perpustakaan.
- 5) Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menyusun Rencana Strategik yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan harapan dapat merupakan acuan dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dan yang telah ditetapkan antara lain yaitu :

6.3. VISI DAN MISI

a. **Visi** Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah :

**“ARSIP DAN PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER INFORMASI, DAN ILMU
PENGETAHUAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”**

b. Misi

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber daya Manusia Kearsipan dan Perpustakaan.
- 2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan.
- 3. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
- 4. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan.

c. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah

d. Fungsi

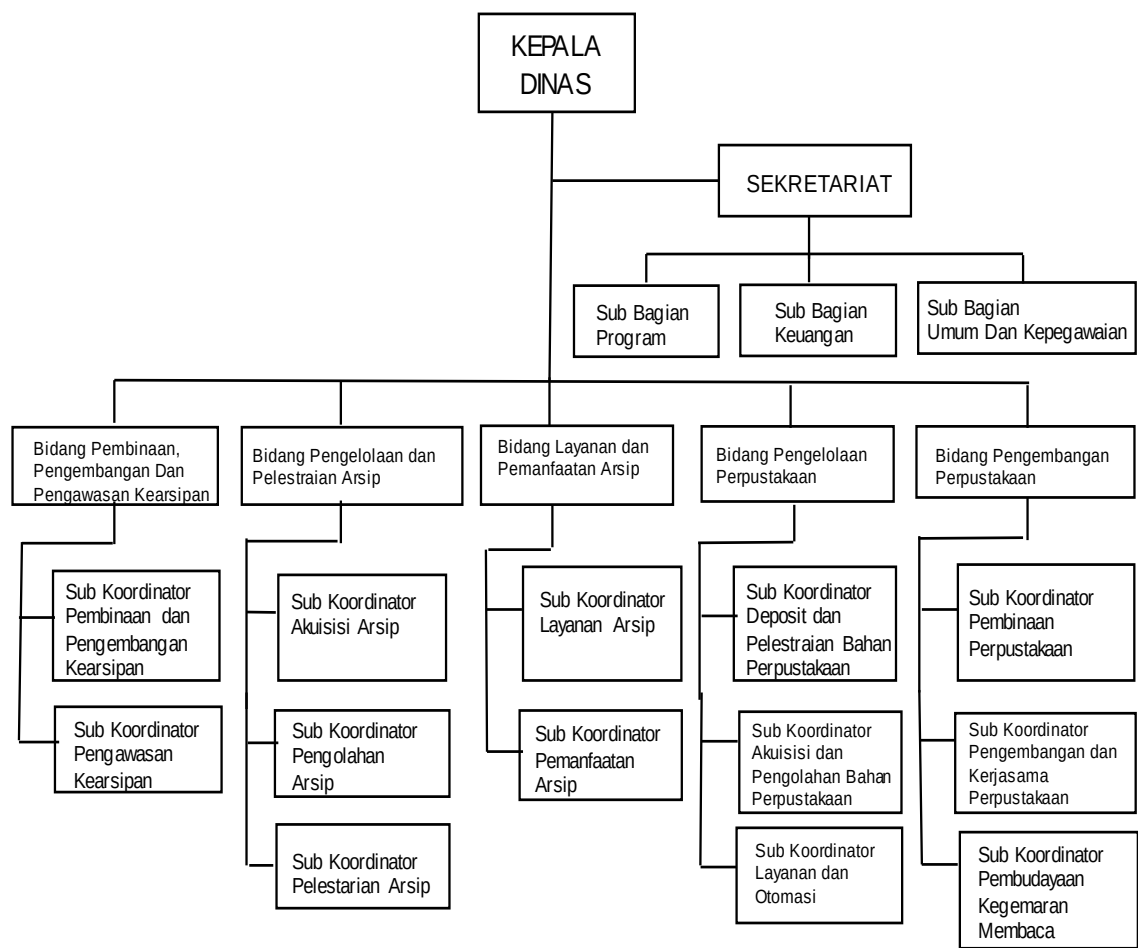
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam poin 6.3., Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan.;
- 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan;
- 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.4. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 84 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

STRUKTUR ORGANISASI



DATA KEPEGAWAIAN

a. Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jumlah	%
Aparatur Sipil Negara (ASN)		
- Jabatan Struktural	9	4,92
- Jabatan Fungsional Pustakawan	40	21,86
- Jabatan Fungsional Arsiparis	50	27,32
- Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian	1	0,55
- Jabatan Fungsional Umum	56	30,60
Non Aparatur Sipil Negara (ASN)		
- Outsourcing	27	14,75
Jumlah	183	100,00

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. Desember 2023

b. Komposisi Personil Berdasarkan Golongan/Pendidikan

No	Struktural	Jumlah
1	Eselon II a	1 orang
2	Eselon III a	5 orang
3	Eselon IV a	3 orang
Fungsional		
1	Arsiparis	50 orang
2	Pustakawan	40 orang
3	Analisis Kepegawaian	1 orang
4	Fungsional Umum	56 orang
Golongan		
1	Golongan IV	42 orang
2	Golongan III	83 orang
3	Golongan II	26 orang
4	Golongan I	3 orang
5	Kelas 9	2 orang
Pendidikan		
1	S2	26 orang
2	S1	64 orang
3	D4	5 orang
4	D3	29 orang
5	SMA	29 orang
6	SMP	1 orang
7	SD	2 orang
Non ASN		
1	Outsourcing	27 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d. Desember 2023



Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 7

PENUTUP

BAB 7

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2023. Catatan atas laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Semarang, 31 Desember 2023

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP. M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19720502 199903 1 008



LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Dr. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang Kode Pos 50265 Telepon(024) 7473746 Faksimile (024)
7473800, Laman arpusda.jatengprov.go.id
Surat Elektronik dinas.arpusjateng@gmail.com

BERITA ACARA
INVENTARISASI FISIK PERSEDIAAN (STOCK OPNAME)

Nomor : 000 2.3 2 / 259.

Pada hari ini, Jumat tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di lantai XII pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUNGADI
NIP : 19670918 198902 1 001
Pangkat /Gol : Penata Muda Tingkat I/IIIb
Jabatan : Pengurus Barang
2. Nama : SINAWANG KISANDRA, S.Akun
NIP : -
Pangkat /Gol : -
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

Telah melakukan pemeriksaan fisik berupa barang persediaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Stock	Jumlah
1.	1.1.7.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	1,803	Rp. 45.919.500

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

SINAWANG KISANDRA, S.Akun

PIHAK PERTAMA

SUNGADI

NIP. 19670918 198902 1 001

MENGETAHUI

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DEFRANCISCO DASILVA TAVARES, SP, M.Si
NIP. 19720502-199903 1 008





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172

Faksimile 024 - 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 27/BA-RKN/SKPD-TWI/IV/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **NGASIRAN, SE.Akt, M.Ak**
NIP : **19800405 201101 1 007**
Jabatan : **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Provinsi Jawa Tengah**
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAPTA HERMAWATI, SH, MM**
NIP : **19650906 198603 2 009**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah**
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi atas Data realisasi LPJ pada SKPD yang terdapat pada SPJ Fungsional Pendapatan dan Belanja serta Realisasi Pendapatan dan Belanja yang sudah disahkan oleh BUD Triwulan Pertama Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Semarang, 12 April 2023



Pihak Kedua

SAPTA HERMAWATI, SH, MM
NIP. 19650906 198603 2 009

Pihak Pertama

NGASIRAN, SE.Akt, M.Ak
NIP. 19800405 201101 1 007

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD TRIWULAN I

Periode 1 Januari s/d 31 Maret 2023

Uraian	BPKAD (Pengesahan BUD)	Realisasi SKPD (SPJ Fungsional)	Selisih	Keterangan
Pendapatan	17.836.500	17.836.500	-	
Pendapatan Asli Daerah	17.836.500	17.836.500	-	
Pajak Daerah	-	-	-	
Retribusi Daerah	17.836.500	17.836.500	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Transfer	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	
			-	
Belanja	7.514.485.194	7.514.485.194	-	
Belanja Pegawai	5.926.158.323	5.926.158.323	-	
Belanja Barang dan Jasa	1.588.326.871	1.588.326.871	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	-	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
Belanja Modal	-	-	-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Transfer	-	-	-	



Pihak Kedua

SAPTA HERMAWATI, SH, MM

NIP. 19650906 198603 2 009

Pihak Pertama

NGASIRAN, SE, Akt, M, Ak

NIP. 19800405 201101 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 -8311172

Faksimile 024 – 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 27/BA-RKN/SKPD-SMTI/VII/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **NENCY WIDYA RAHAYU, SE. Akt, M.Ak**

NIP : **19801022 200903 2 009**

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **KASIDI, SE**

NIP : **19680331 199803 1 004**

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : **SAPTA HERMAWATI, SH, MM**

NIP : **19650906 198603 2 009**

Jabatan : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi atas:

- 1) Data realisasi LPJ pada SKPD yang terdapat pada SPJ Fungsional Pendapatan dan Belanja serta Realisasi Pendapatan dan Belanja yang sudah disahkan oleh BUD; dan
- 2) Data realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal yang menjadi aset tetap

Rekonsiliasi Semester 1 Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Surakarta, 20 Juli 2023

Pihak Kedua

KASIDI, SE

NIP. 19680331 199803 1 004

Pihak Pertama

NENCY WIDYA RAHAYU, SE. Akt, M.Ak

NIP. 19801022 200903 2 009

Pihak Ketiga

SAPTA HERMAWATI, SH, MM

NIP. 19650906 198603 2 009

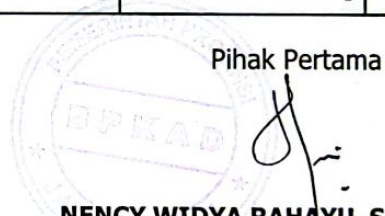
REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD SEMESTER I
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2023

Uraian	BPKAD (Pengesahan BUD)	Realisasi SKPD (SPJ Fungsional)	Selisih	Keterangan
Pendapatan	32.584.500	32.584.500	-	
Pendapatan Asli Daerah	32.584.500	32.584.500	-	
Pajak Daerah	-	-	-	
Retribusi Daerah	32.584.500	32.584.500	-	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	
Pendapatan Transfer	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	
			-	
Belanja	18.353.926.709	18.353.926.709	-	
Belanja Pegawai	14.692.040.250	14.692.040.250	-	
Belanja Barang dan Jasa	3.349.124.906	3.349.124.906	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	-	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
Belanja Modal	312.761.553	312.761.553	-	
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
Belanja Transfer	-	-	-	



SAPTA HERMAWATI, SH, MM
NIP. 19650906 198603 2 009

Pihak Ketiga



NENCY WIDYA RAHAYU, SE. Akt, M.Ak
NIP. 19801022 200903 2 009

Pihak Pertama

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL YANG MENJADI ASET TETAP

Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2023

Uraian	Aset		Selisih	Keterangan
	LRA/SPJ Fungsional Belanja	Sim Aset		
Belanja Barang dan Jasa			-	
Belanja Modal	312.761.553,00	312.761.553,00	-	
Tanah	-	-	-	
Alat Besar	-	-	-	
Alat Angkutan	-	-	-	
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-	-	-	
Alat Pertanian	-	-	-	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	4.562.000,00	6.562.000,00	(2.000.000,00)	
Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	-	-	-	
Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	-	-	-	
Alat Laboratorium	-	-	-	
Alat Persenjataan	-	-	-	
Alat Komputer	121.511.000,00	119.511.000,00	2.000.000,00	Alat scanner
Alat Eksplorasi	-	-	-	
Alat Pengeboran	-	-	-	
Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	-	-	-	
Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	
Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	
Alat Peraga	-	-	-	
Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	
Rambu Rambu	-	-	-	
Peralatan Olah Raga	-	-	-	
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD	-	-	-	
Bangunan Gedung	-	-	-	
Monumen	-	-	-	
Bangunan Menara	-	-	-	
Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan BLUD	-	-	-	
Jalan Dan Jembatan	-	-	-	
Bangunan Air	-	-	-	
Instalasi	-	-	-	
Jaringan	-	-	-	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi BLUD	-	-	-	
Bahan Perpustakaan	186.688.553,00	186.688.553,00	-	
	-	-	-	
Hewan	-	-	-	
Biota Perairan	-	-	-	
Tanaman	-	-	-	
Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	
Belanja Modal Aset Tetap	-	-	-	

PEMERINTAH PROVINSI
DINAS ARPUS
Pihak Ketiga
SAPTA HERMAWATI, SH, MM
NIP. 19650906 198603 2 009

PEMERINTAH PROVINSI
BPKAD
Pihak Kedua
KASIDI, SE
NIP. 19680331 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Dr. Setiabudi No. 201 C Srandol Semarang Kode Pos 50265 Telepon(024) 7473746 Faksimile (024) 7473800. Laman arpusda.jatengprov.go.id
Surat Elektronik dinas.arpusjateng@gmail.com

BERITA ACARA
INVENTARISASI FISIK PERSEDIAAN (STOCK OPNAME)

Nomor : 000 232 / 259

Pada hari ini, Jumat tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di lantai XII pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUNGADI
NIP : 19670918 198902 1 001
Pangkat /Gol : Penata Muda Tingkat I/IIIb
Jabatan : Pengurus Barang

2. Nama : SINAWANG KISANDRA, S.Akun
NIP : -
Pangkat /Gol : -
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

Telah melakukan pemeriksaan fisik berupa barang persediaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Stock	Jumlah
1.	1.1.7.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	1,803	Rp. 45.919.500

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

SINAWANG KISANDRA, S.Akun

PIHAK PERTAMA

SUNGADI

NIP. 19670918 198902 1 001

MENGETAHUI

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



DEFRANCISCO DASILVA TAVARES, SP, M.Si
NIP. 19720502-199903 1 008



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024 - 8311172
Faksimile 024 - 8311172 laman [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 27/BA-RKN/ASET-SKPD/I/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : **DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.**
NIP : **19851204 200902 2 012**
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SANADI, SE, M.Ak**
NIP : **19790927 200003 1 005**
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah BPKAD Provinsi Jawa Tengah
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : **KASIDI, SE**
NIP : **19680331 199803 1 004**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Provinsi Jawa Tengah,
yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga

Nama : **DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI**
NIP : **19720502 199903 1 008**
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

yang selanjutnya disebut Pihak Keempat

Para pihak telah melakukan rekonsiliasi data realisasi APBD, belanja barang dan jasa yang menjadi aset dan belanja modal Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (Empat) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Wonorejo, 22 Januari 2024

Pihak Kedua

SANADI, SE, M.Ak

NIP. 19790927 200003 1 005

Pihak Keempat

DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI

NIP. 19720502 199903 1 008

Pihak Pertama

DEASY RINA WIJAYANTI , SE, M.Si.

NIP. 19851204 200902 2 012

Pihak Ketiga

KASIDI, SE

NIP. 19680331 199803 1 004

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA APBD

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi Bid. AKT BPKAD	Realisasi SKPD	Selisih	Keterangan
Pendapatan	73.523.500	73.523.500	-	
Pendapatan Asli Daerah	73.523.500	73.523.500	-	
Pajak Daerah	-		-	
Retribusi Daerah	70.773.500	70.773.500	-	
Lain-lain PAD yang Sah	2.750.000	2.750.000	-	
Pendapatan Transfer	-		-	
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		-	
Belanja	33.728.903.970	33.728.903.970	-	
Belanja Pegawai	26.314.408.703	26.314.408.703	-	
Belanja Barang dan Jasa	6.652.779.094	6.652.779.094	-	
Belanja Subsidi	-		-	
Belanja Hibah	-		-	
Belanja Bantuan Sosial	-		-	
Belanja Modal	761.716.173	761.716.173	-	
Belanja Tidak Terduga	-		-	
Belanja Transfer	-		-	

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terlampir.



Pihak Keempat

DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI

NIP. 19720502 199903 1 008



Pihak Pertama

DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.

NIP. 19851204 200902 2 012

REKONSILIASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023

Uraian	Rekapitulasi Kasda	Rekapitulasi SKPD	Selisih	Keterangan
Penerimaan				
Pendapatan	73.523.500	73.523.500,00	-	
Contrapost Belanja	4.407.500	4.407.500,00	-	
Pengembalian UP dan TU	244.371.780	244.371.780,00	-	
TOTAL	322.302.780	322.302.780	-	
SP2B Pendapatan	-		-	
Pengeluaran (SP2D)				
LS	27.269.375.333	27.269.375.333,00	-	
BTT dan Belanja Transfer	-	-	-	
UP	500.000.000	500.000.000,00	-	
GU	4.506.091.977	4.506.091.977,00	-	
TU	1.702.215.940	1.702.215.940,00	-	
Pengembalian Pendapatan	-	-	-	
TOTAL	33.977.683.250	33.977.683.250	-	
SP2B Belanja	-		-	

Rincian Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 terlampir.

Pihak Kedua

[Signature]

SANADI, SE, M.Ak

NIP. 19790927 200003 1 005



Pihak Keempat

DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI
NIP. 19720502 199903 1 008



Pihak Pertama

DEASY RINAWATI, SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012

REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA YANG MENJADI ASET DAN BELANJA MODAL

Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023

Uraian	Aset		Selisih	Keterangan
	Akuntansi	Sim Aset		
Belanja Barang dan Jasa			-	
Belanja Modal	761.716.173	761.716.173	-	
Tanah	-		-	
Alat Besar	-		-	
Alat Angkutan	-		-	
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-	490.000	(490.000)	
Alat Pertanian	-		-	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	179.562.000	181.562.000	(2.000.000)	
Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	4.660.000	4.660.000	-	
Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	-		-	
Alat Laboratorium	-		-	
Alat Persenjataan	-		-	
Alat Komputer	150.411.000	148.411.000	2.000.000	
Alat Eksplorasi	-		-	
Alat Pengeboran	490.000		490.000	
Alat Produksi, Pengelolaan Dan Pemurnian	-		-	
Alat Bantu Eksplorasi	-		-	
Alat Keselamatan Kerja	-		-	
Alat Peraga	-		-	
Peralatan Proses/Produksi	-		-	
Rambu Rambu	-		-	
Peralatan Olah Raga	-		-	
Peralatan dan Mesin BOS	-		-	
Peralatan dan Mesin BLUD	-		-	
Bangunan Gedung	-		-	
Monumen	-		-	
Bangunan Menara	-		-	
Tugu Titik Kontrol/Pasti	-		-	
Gedung dan Bangunan BLUD	-		-	
Jalan Dan Jembatan	-		-	
Bangunan Air	-	426.593.173	(426.593.173)	
Instalasi	-		-	
Jaringan	-		-	
Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	-		-	
Bahan Perpustakaan	426.593.173		426.593.173	

Barang Bercorak				
Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga	-		-	
Hewan	-		-	
Biota Perairan	-		-	
Tanaman	-	-	-	
Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	
Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	
Aset Tetap Lainnya BLUD	-	-	-	
Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	-	-	-	
Aset Lainnya BLUD	-	-	-	

NB: semua kekurangan dan perbedaan akan diselesaikan paling lambat 26 Januari 2024

Pihak Ketiga



KASIDI, SE

NIP. 19680331 199803 1 004

Pihak Pertama



DEASY RINA WILAYANTI, SE, M.Si.

NIP. 19851204 200902 2 012

Pihak Keempat



DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI

NIP. 19720502 199903 1 008

Ceklist Kebutuhan Penyusunan Laporan Keuangan

No	Uraian	Lengkap	Tidak	NILAI	Keterangan
1	Berita Acara Stock Opname	v		3.863.600,00	
2	Rekapitulasi Hutang dan Piutang		v		
3	Rekapitulasi Pendapatan diterima di muka		v		
4	Rekapitulasi sisa kas bendahara penerimaan dan pengeluaran		v		
5	Rekapitulasi Belanja dibayar di muka	v		10.693.501,67	
6	Kertas Kerja Aset Tetap, Aset Lainnya (cetak sim asset)	v			
7	LRA epenatausahaan level 6	v		- 33.655.380.470,00	
8	Draft Kertas Kerja Penyusunan Laporan Keuangan	v		- 33.655.380.470,00	Baru sampai LRA dan Jurnal

NB: semua kekurangan dan perbedaan akan diselesaikan paling lambat 26 Januari 2024



Pihak Keempat

DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI
NIP. 19720502 199903 1 008



Pihak Pertama

DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.
NIP. 19851204 200902 2 012

REKAPITULASI PERSEDIAAN
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi Belanja Barang (LRA SKPD)	Penerimaan Barang Jasa 2023 (SIM ASET)	Selisih	Keterangan
Persediaan			-	
Barang Pakai Habis	1.203.514.909,00	361.999.941,09	841.514.967,91	Selisih akan dijelaskan pada hari Rabu 24 Jan 2024
Barang Tak Habis Pakai	-		-	
Barang Bekas Dipakai	-		-	
Total	1.203.514.909,00	361.999.941,09	841.514.967,91	

NB: semua kekurangan dan perbedaan akan diselesaikan paling lambat 26 Januari 2024

Pihak Ketiga



KASIDI, SE

NIP. 19680331 199803 1 004

Pihak Pertama



DEASY RINA WIJAYANTI, SE, M.Si.

NIP. 19851204 200902 2 012

Pihak Keempat



DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP MSI

NIP. 19720502 199903 1 008

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
ASURANSI DAN SEWA DIBAYAR DIMUKA 2023**

SKPD : DINAS ARPUS

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR KENDARAAN	NILAI KONTRAK PER BARANG YANG DISPKAN	JANGKA WAKTU ASURANSI		AKHIR TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARI	JUMLAH HARI YG JADI BEBAN	JUMLAH HARI YG JADI BELANJA DIBAYAR DIMUKA	BEBAN	BELANJA DIBAYAR DIMUKA
					TANGGAL AWAL ASURANSI	TANGGAL AKHIR ASURANSI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13=5-12
	ASURANSI											
1	Kendaraan Roda 4 atau lebih			39.843.690,00							33.221.169,32	6.622.520,68
	TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V AT DIESEL	2016	H-53	4.413.000,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	3.679.504,09	733.495,91
	NISSAN X-TRAIL 2.0 A/T	2016	H-1839-XG	4.408.940,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	3.676.116,91	732.821,09
	TOYOTA KIJANG INNOVA G	2013	H-9519-CZ	5.012.750,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	4.179.568,12	833.181,88
	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T	2015	H-1507-XG	3.477.260,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	2.899.295,80	577.964,20
	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T	2015	H-1508-XG	3.477.260,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	2.899.295,80	577.964,20
	TOYOTA ALL NEW AVANZA 1.5 G M/T	2014	H-9512-KZ	3.297.780,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	2.749.647,63	548.132,37
	TOYOTA KIJANG INNOVA E	2009	H-1840-XG	3.993.500,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	3.329.730,25	663.769,75
	TOYOTA KIJANG INNOVA E	2013	H-9513-DZ	4.309.375,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	3.593.102,66	716.272,14
	HONDA CIVIC ALL NEW 1,8 MT FD1	2007	H-9501-MR	4.448.825,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	3.709.374,52	739.450,48
	HONDA CIVIC 55A MT VT1-S	2003	H-9522-LR	3.005.000,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	2.505.531,34	499.468,56
2	Kendaraan Roda 2 dan 3											
3	Gedung dan Bangunan			24.492.623,00							20.421.642,06	4.070.980,94
	A. Bangunan Gedung dan barang-barang Inventaris (SRONDOL)			17.859.823,76								
	Bangunan Gedung Kantor Permanen EKS KAD			1.114.566,66	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	929.311,71	185.254,95
	Bangunan Gedung Kantor Permanen DEPO SELATAN			5.007.656,55	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	4.175.321,27	832.335,28
	Bangunan Gedung Kantor Permanen DEPO BARAT			2.102.011,29	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	1.752.630,67	349.380,62
	Pagar			161.208,36	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	134.413,51	26.794,85

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR KENDARAAN	NILAI KONTRAK PER BARANG YANG DISPKAN	JANGKA WAKTU ASURANSI		AKHIR TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARI	JUMLAH HARI YG JADI BEBAN	JUMLAH HARI YG JADI BELANJA DIBAYAR DIMUKA	BEBAN	BELANJA DIBAYAR DIMUKA
					TANGGAL AWAL ASURANSI	TANGGAL AKHIR ASURANSI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13=5-12
	Pagar			29.466,08	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	24.570,12	4.897,96
	Rumah Genset Depo Selatan			291.066,38	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	242.687,50	48.378,88
	Gedung Pos Jaga Permanen			5.012,64	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	4.179,48	833,16
	Bangunan Gedung Kantor Permanen			2.350.471,50	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	1.959.793,68	390.677,82
	Rumah Genset Depo Barat			64.612,08	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	53.872,74	10.739,34
	Gedung Pos Jaga Permanen			4.779,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	3.984,67	794,33
	Doorloop			43.542,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	36.304,77	7.237,23
	Gedung Pos Jaga Permanen			3.186,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	2.656,45	529,55
	Kamar Mandi			32.922,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	27.449,95	5.472,05
	Doorloop			39.752,78	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	33.145,37	6.607,41
	Doorloop			37.097,78	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	30.931,66	6.166,12
	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pusat)			5.207.601,01	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	4.342.032,45	865.568,56
	Taman			23.895,00	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	19.923,35	3.971,65
	Talud			47.375,88	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	39.502,25	7.874,63
	Tempat Parkir			98.587,58	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	82.201,09	16.386,49
	Pembuatan Doorloop			144.430,94	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	120.424,71	24.006,23
	Ruang Cool Storage			682.147,03	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	568.765,64	113.381,39
	Pergampasan Halaman & Lap. Volley			27.797,85	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	23.177,50	4.620,35
	Tempat Parkir			101.428,43	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	84.569,75	16.858,68
	Kantin			113.119,99	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	94.318,03	18.801,96
	Papan Nama			126.085,95	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	105.128,88	20.957,07
	B. Bangunan Kantor PERPUSDA (Sriwijaya)			6.632.799,24								
	Bangunan Gedung Kantor Permanen			2.618.519,66	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	2.183.288,87	435.230,79
	Bangunan Gedung Kantor Permanen			3.452.565,35	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	2.878.705,71	573.859,64

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NOMOR KENDARAAN	NILAI KONTRAK PER BARANG YANG DISPKAN	JANGKA WAKTU ASURANSI		AKHIR TAHUN ANGGARAN	JUMLAH HARI	JUMLAH HARI YG JADI BEBAN	JUMLAH HARI YG JADI BELANJA DIBAYAR DIMUKA	BEBAN	BELANJA DIBAYAR DINUKA
					TANGGAL AWAL ASURANSI	TANGGAL AKHIR ASURANSI						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13=5-12
	Pos Jaga			31.961,42	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	26.649,03	5.312,39
	Pos Jaga			31.961,42	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	26.649,03	5.312,39
	Kantin			151.270,35	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	126.127,32	25.143,03
	Tempat Parkir			346.521,04	01-Mar-23	01-Mar-24	31-Dec-23	367	306,00	61,00	288.924,90	57.596,14
4	Barang Milik Daerah Lainnya			-							-	-
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS			-							-	-
6	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS			-							-	-
	JUMLAH			64.336.313,00							53.642.811,38	10.693.501,62
	SEWA											
1	Belanja Sewa Rumah Dinas/Gedung			-							-	-
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			-							-	-
3	Belanja Sewa Alat Berat			-							-	-
4	Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor			-							-	-
	JUMLAH			-							-	-





MUTASI PERSEDIAAN

Tahun 2023
Periode s/d Bulan DESEMBER 2023

Kode Lokasi : 022401
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No.	Uraian	SALDO AWAL Tahun 2023		PENAMBAHAN										PELEPASAN										SALDO AKHIR PERIODE									
		Jml.	Harga	Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Penggunaan	Jml.	Hibah	Jml.	Distribusi	Jml.	Retur	Jml.	Kadaluwarsa	Jml.	Koreksi	PERIODE 202312	Jumlah Kurang	Jml.	Harga
				BELI		HBHM		DISM		MRTUR		HUM		INV/KOR		GUNA		HBHK		DISK		RTUR		KORB		KOR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
1	1.1.7.01.01	BAHAN																															
2	1.1.7.01.02	SUKU CADANG																															
3	1.1.7.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	5	947.750,00	47.918	578.518.466,09	-	-	-	47.918	578.518.466,09	46.120	533.546.716,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.120	533.546.716,09	1.803	45.919.500,00	
4	1.1.7.01.04	OBAT-OBATAN																															
5	1.1.7.01.05	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN																															
6	1.1.7.01.06	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA																															
7	1.1.7.01.07	NATURA DAN PAKAN																															
8	1.1.7.01.08	PERSEDIAAN PENELITIAN																															
9	1.1.7.01.09	PERSEDIAAN DALAM PROSES																															
10	1.1.7.02.01	KOMPONEN																															
11	1.1.7.02.02	P I P A																															
12	1.1.7.03.01	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS																															
			5	947.750,00	47.918	578.518.466,09	-	-	-	47.918	578.518.466,09	46.120	533.546.716,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.120	533.546.716,09	1.803	45.919.500,00		



Mendagri,
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ARPUS
DE FRANCISCO M. J. TRIVARES, SP. MSI
NIP. 19720902 199003 1 008

Semarang, 31 Desember 2023

Pengurus Barang

SUNGGU
NIP. 19670918 198902 1 001



Tahun 2023
Periode 6id Bulan DESEMBER 2023

Kode Lokasi : 022401
Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

[illegible]

Semarang, 31 Desember 2023

~~Penguin Island~~

SUNGAI
NIP. 19670818 196703-1 001



: 022401
: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
: DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Semarang, 31 Desember 2023

Pengurus Barang

SUNGADI
NIP. 19670218 198902 1 001





AKUMULASI PENYUSUTAN ASET EKSTRAKOMPTABEL
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2023
Periode s/d Bulan DESEMBER 2023

Kode Lokasi : 022401
Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumulasi Awal	TAMBAH					Mutasi Keluar	KURANG				Beban	Akumulasi Akhir	Nilai Buku	
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas				Koreksi	Reklas						Koreksi
								Dari Aset Ekstra	Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya			Ke Aset Ekstra	Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1.3.7.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.3.7.01.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.3.7.01.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	10	3.035.000,00	2.396.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.698,67	2.553.196,67	481.833,33
4	1.3.7.01.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.3.7.01.05	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	1.337	363.038.580,00	381.309.929,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411.583,33	381.721.513,32	1.317.086,68
6	1.3.7.01.06	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	56	15.846.148,00	15.846.148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.846.148,00	-
7	1.3.7.01.07	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.3.7.01.08	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.3.7.01.09	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERSEJAJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.7.01.10	AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER	11	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000,00	-
11	1.3.7.01.11	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.3.7.01.12	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.7.01.13	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.7.01.14	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.7.01.15	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.7.01.16	AKUMULASI PENYUSUTAN PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.7.01.17	AKUMULASI PENYUSUTAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.7.01.18	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.7.01.19	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA	2	650.000,00	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000,00	-
20	1.3.7.02.01	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.3.7.02.02	AKUMULASI PENYUSUTAN MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.3.7.02.03	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.3.7.02.04	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1.3.7.03.01	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.3.7.03.02	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.3.7.03.03	AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.3.7.03.04	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1.3.7.04.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.416	407.169.728,00	404.802.577,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.250,00	405.370.827,99	1.798.900,01



Semarang, 31 Desember 2023

Pengurus Barang

NIP. 19670913-198902 1 001



AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2023
Periode s/d Bulan DESEMBER 2023

Kode Lokasi : 022401
Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No.	Uraian	Jml.	Nilai Akhir	Akumulasi Awal	Tambah			Kurang							Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
					Reklas dari Aset tetap	Reklas dari Aset ATB	Koreksi Tambah	Reklas ke Aset Tetap	Reklas ke Aset ATB	Reklas Ke Pemanfaatan	Penjualan	Ganti Rugi	Hibah dll	Koreksi			
1	1.5.6.01.01.02.001 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET	1.318	1.498.028.824,00	1.498.028.824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.498.028.824,00	-
2	1.5.6.01.01.02.002 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.5.6.01.01.02.003 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.318	1.498.028.824,00	1.498.028.824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.498.028.824,00	-



Semarang, 31 Desember 2023

Pengurus Barang

SUNARDI
NIP. 19670914 198902 1 001



Kode Lokasi : 022401
Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Mengetahui,
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP, MSI,
NIA 19720502 199903 1 008

Semarang, 31 Desember 2023

Perpustakaan Barang

SUNGADI
NIP. 19670918 198902 1 001



AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2023
Periode s/d Bulan DESEMBER 2023

Kode Lokasi : 022401
Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

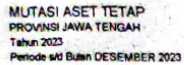
No.	Uraian	Jml.	Nilai Akhir	Akumulasi Awal	Tambah					Kurang					Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
					Hibah	Mutasi Masuk	Rekasi dari Aset Tetap	Rekasi dari Aset Lainnya	Koreksi	Ekstrakontabel	Mutasi Keluar	Reklas ke Aset Tetap	Reklas ke Aset Lainnya	Koreksi			
1	1.5.5.01.01.01.001 AKUMULASI AMORTISASI GOODWILL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.5.5.01.01.01.002 AKUMULASI AMORTISASI LISENSI DAN FRENCHISE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.5.5.01.01.01.003 AKUMULASI AMORTISASI HAK CIPTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.5.5.01.01.01.004 AKUMULASI AMORTISASI HAK PATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.5.5.01.01.01.005 AKUMULASI AMORTISASI SOFTWARE	2	193.550.000,00	193.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.550.000,00	-
6	1.5.5.01.01.01.006 AKUMULASI AMORTISASI KAJIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.5.5.01.01.01.007 AKUMULASI AMORTISASI YANG MEMPUYAI NILAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.5.5.01.01.01.008 AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	193.550.000,00	193.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.550.000,00	-



Semarang, 31 Desember 2023

Pengurus Barang

NIP. 19670918 198902 1 001



Kode Lokasi : 022401
Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No.		Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2023		PENAMBAHAN														PELEPASAN											SALDO AKHIR Periode 2023/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Jml.	Ngrg	Jml.	Belanja Modal	Jml.	Belanja Hutang	Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Mutasi Masuk	Jml.	Dari Aset Tetap	Jml.	Dari Aset Lainnya	Jml.	Dari Aset Ekstra kompon	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambahan	Jml.	Mutasi Keluar	Jml.	Ke Aset Tetap	Jml.	Ke Aset Lainnya	Jml.	Ke Aset Ekstra kompon	Jml.	Koreksi Barang Modal	Jml.	Koreksi Belanja Hutang	Jml.	Koreksi Thn Lusa	Jml.	Jumlah Kurang	Jml.	Hangsa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					BMD	BMH	NBM	HBM	HUM	MMK	BKM	ASL	ASE	INV/NLK														MLK	RKL	RBL	KAD	KDRA	KDRB	KOR/NLK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	1.3.1.01	TANAH	1	4.548.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.548.500.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	10	4.065.823.260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4.065.823.260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	98	5.470.634.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	5.470.634.945																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
4	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	108	2.056.129.956	1	490.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	2.056.129.956																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	1.3.2.04	ALAT PERTANJIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Semarang, 31 Desember 2023

~~Pengurus Barang~~

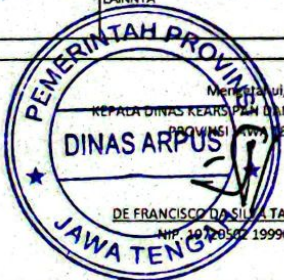
SUNGADI
NIP. 19670913 198902 1 001



AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2023
Periode s/d Bulan DESEMBER 2023

Kode Lokasi : 022401
Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumulasi Awal	TAMBAH					KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU	
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas						KOREKSI
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakompiabel			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakompiabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1.3.7.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR	10	4.065.823.260,00	4.065.823.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.065.823.260,00	-
2	1.3.7.01.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN	39	5.890.636.345,00	5.141.424.282,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.033.437,50	5.289.457.720,00	601.178.625,00
3	1.3.7.01.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	106	2.056.129.956,00	1.483.707.677,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.544.255,70	1.625.251.933,20	430.878.022,80
4	1.3.7.01.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.3.7.01.05	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	3.160	24.376.147.515,00	23.265.031.428,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.803.363,33	23.670.834.791,75	705.312.723,25
6	1.3.7.01.06	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	333	6.243.089.824,00	6.206.353.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.774.940,00	6.239.128.824,00	3.981.000,00
7	1.3.7.01.07	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.3.7.01.08	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM	12	142.260.000,00	142.260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.260.000,00	-
9	1.3.7.01.09	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.7.01.10	AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER	546	5.778.716.446,00	5.429.792.847,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.885.530,00	5.512.678.377,74	266.038.088,26
11	1.3.7.01.11	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.3.7.01.12	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.7.01.13	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.7.01.14	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.7.01.15	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.7.01.16	AKUMULASI PENYUSUTAN PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.7.01.17	AKUMULASI PENYUSUTAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.7.01.18	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.7.01.19	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1.3.7.02.01	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG	27	22.719.853.147,00	11.646.446.447,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473.305.295,58	12.119.751.742,82	10.600.101.404,16
21	1.3.7.02.02	AKUMULASI PENYUSUTAN MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1.3.7.02.03	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.3.7.02.04	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI	4	342.680.670,00	92.165.303,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.131.735,68	99.297.039,16	243.583.630,54
24	1.3.7.03.01	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.3.7.03.02	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR	2	190.275.000,00	90.320.161,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.831.451,81	96.151.612,90	94.123.387,10
26	1.3.7.03.03	AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.3.7.03.04	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	1	16.700.000,00	11.690.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.500,00	12.107.500,00	4.582.500,00
28	1.3.7.04.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.260	71.822.512.163,00	57.575.015.292,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.297.727.509,38	58.872.742.801,57	12.949.789.361,43

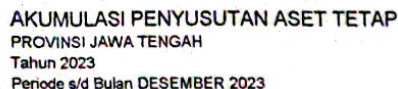


Mengesahkan,
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROVINSI JAWA TENGAH
DE FRANCISCO DASILVA TAVARES, SP. MSI
NIP. 197205021999032008

Semarang, 31 Desember 2023

Pengurus Barang

SUNGADI
NIP. 196709181989021001



Kode Lokasi : 022401
Bidang : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Bidang :
Satuan Kerja : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumuaasi Awal	TAMBAH					KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU	
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas						KOREKSI
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakomptab			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakomptabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1.3.7.01.01.01.001	Akumulasi Penyusutan Tractor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.3.7.01.01.01.002	Akumulasi Penyusutan Grader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.3.7.01.01.01.003	Akumulasi Penyusutan Excavator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.3.7.01.01.01.004	Akumulasi Penyusutan Pile Driver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.3.7.01.01.01.005	Akumulasi Penyusutan Hauler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1.3.7.01.01.01.006	Akumulasi Penyusutan Asphalt Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1.3.7.01.01.01.007	Akumulasi Penyusutan Compacting Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.3.7.01.01.01.008	Akumulasi Penyusutan Aggregate and Concrete Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.3.7.01.01.01.009	Akumulasi Penyusutan Loader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1.3.7.01.01.01.010	Akumulasi Penyusutan Alat Pengangkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1.3.7.01.01.01.011	Akumulasi Penyusutan Mesin Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1.3.7.01.01.01.012	Akumulasi Penyusutan Alet Besar Darat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1.3.7.01.01.02.001	Akumulasi Penyusutan Dredger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.7.01.01.02.002	Akumulasi Penyusutan Floating Excavator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.7.01.01.02.003	Akumulasi Penyusutan Amphibi Dredger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1.3.7.01.01.02.004	Akumulasi Penyusutan Kapal Tarik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1.3.7.01.01.02.005	Akumulasi Penyusutan Mesin Proses Apung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1.3.7.01.01.02.006	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.3.7.01.01.03.001	Akumulasi Penyusutan Alat Penarik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.670.027.260,00	-
20	1.3.7.01.01.03.002	Akumulasi Penyusutan Feeder	4	2.670.027.260,00	2.670.027.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1.3.7.01.01.03.003	Akumulasi Penyusutan Compressor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.170.796.000,00	-
22	1.3.7.01.01.03.004	Akumulasi Penyusutan Electric Genetaring Set	5	1.170.796.000,00	1.170.796.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1.3.7.01.01.03.005	Akumulasi Penyusutan Pompa	1	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000,00	-
24	1.3.7.01.01.03.006	Akumulasi Penyusutan Mesin Bor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.3.7.01.01.03.007	Akumulasi Penyusutan Unit Pemeliharaan Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1.3.7.01.01.03.008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Air Kotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.3.7.01.01.03.009	Akumulasi Penyusutan Pembangkit uap Air Panas/Steam Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1.3.7.01.01.03.010	Akumulasi Penyusutan Air Port Penerbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1.3.7.01.01.03.011	Akumulasi Penyusutan Mesin Tetoo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1.3.7.01.01.03.012	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kebakaran Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1.3.7.01.01.03.013	Akumulasi Penyusutan Peralatan Selam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1.3.7.01.01.03.014	Akumulasi Penyusutan Peralatan SAR Mountienring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1.3.7.01.01.03.015	Akumulasi Penyusutan Peralatan Intelejen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.3.7.01.01.03.016	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.220.937,50	1.223.313.658,00	100.772.375,00
35	1.3.7.01.02.01.001	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4	1.324.086.233,00	1.121.092.920,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.954.644.338,00	-
36	1.3.7.01.02.01.002	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	12	1.954.644.338,00	1.954.644.338,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.000.000,00	-
37	1.3.7.01.02.01.003	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1.3.7.01.02.01.004	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10	167.340.000,00	167.340.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.340.000,00	-

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumulasi Awal	TAMBAH					KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU	
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas						KOREKSI
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakomptabel			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakomptabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
39	1.3.7.01.02.01.005	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1.3.7.01.02.01.006	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	11	2.284.565.774,00	1.738.347.024,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.812.500,00	1.784.159.524,00	500.408.250,00
41	1.3.7.01.02.01.007	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Tempur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	1.3.7.01.02.01.008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	1.3.7.01.02.01.009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	1.3.7.01.02.02.001	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	1.3.7.01.02.02.002	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1.3.7.01.02.02.003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	1.3.7.01.02.02.004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	1.3.7.01.02.03.001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	1.3.7.01.02.03.002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1.3.7.01.02.03.003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	1.3.7.01.02.03.004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	1.3.7.01.02.03.005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1.3.7.01.02.04.001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	1.3.7.01.02.04.002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	1.3.7.01.02.04.003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	1.3.7.01.02.04.004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1.3.7.01.02.05.001	Akumulasi Penyusutan Kapal Terbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1.3.7.01.02.05.002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	1.3.7.01.03.01.001	Akumulasi Penyusutan Perikakas Pondasi	3	7.450.000,00	7.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.450.000,00	-
60	1.3.7.01.03.01.002	Akumulasi Penyusutan Perikakas (Berpindah)	1	1.168.000,00	1.168.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.168.000,00	-
61	1.3.7.01.03.01.003	Akumulasi Penyusutan Perikakas Bengkel Listrik	2	5.575.000,00	5.575.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.575.000,00	-
62	1.3.7.01.03.01.004	Akumulasi Penyusutan Perikakas Bengkel Service	30	1.080.450.000,00	648.270.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.045.000,00	756.315.000,00	324.135.000,00
63	1.3.7.01.03.01.005	Akumulasi Penyusutan Perikakas Pengangkat Bermesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	1.3.7.01.03.01.006	Akumulasi Penyusutan Perikakas Bengkel Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	1.3.7.01.03.01.007	Akumulasi Penyusutan Perikakas Bengkel Khusus	10	68.135.000,00	61.321.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.813.500,00	68.135.000,00	-
66	1.3.7.01.03.01.008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Las	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	1.3.7.01.03.01.009	Akumulasi Penyusutan Perikakas Pabrik Es	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	1.3.7.01.03.01.010	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1	266.657.557,00	133.428.778,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.685.755,70	180.114.534,20	106.743.022,80
69	1.3.7.01.03.02.001	Akumulasi Penyusutan Perikakas Bengkel Konstruksi Logam	55	603.284.399,00	603.284.399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603.284.399,00	-
70	1.3.7.01.03.02.002	Akumulasi Penyusutan Perikakas Bengkel Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	1.3.7.01.03.02.003	Akumulasi Penyusutan Perikakas Bengkel Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	1.3.7.01.03.02.004	Akumulasi Penyusutan Perikakas Pengangkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	1.3.7.01.03.02.005	Akumulasi Penyusutan Perikakas Standard (Standard Tools)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	1.3.7.01.03.02.006	Akumulasi Penyusutan Perikakas Khusus (Special Tools)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	1.3.7.01.03.02.007	Akumulasi Penyusutan Perikakas Bengkel Kerja	2	19.780.000,00	19.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.780.000,00	-
76	1.3.7.01.03.02.008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Tukang Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumulasi Awal	TAMBAH					KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU	
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas						KOREKSI
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakomprib			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakomprib				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
199	1.3.7.01.06.04.003	Akumulasi Penyusutan Distance Measuring Equipment (DME)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	1.3.7.01.06.04.004	Akumulasi Penyusutan Radar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	1.3.7.01.06.04.005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengatur Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	1.3.7.01.06.04.006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	1.3.7.01.06.04.007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	1.3.7.01.07.01.001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	1.3.7.01.07.01.002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	1.3.7.01.07.01.003	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	1.3.7.01.07.01.004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Bedah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	1.3.7.01.07.01.005	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	1.3.7.01.07.01.006	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran THT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	1.3.7.01.07.01.007	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran mata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	1.3.7.01.07.01.008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	1.3.7.01.07.01.009	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Kamar Jenasah/Mortuary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	1.3.7.01.07.01.010	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	1.3.7.01.07.01.011	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Poliklinik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	1.3.7.01.07.01.012	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	1.3.7.01.07.01.013	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	1.3.7.01.07.01.014	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Jantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	1.3.7.01.07.01.015	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Radiodiagnostic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	1.3.7.01.07.01.016	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Patologi Anatomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	1.3.7.01.07.01.017	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Transfusi Darah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	1.3.7.01.07.01.018	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Radioterapy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	1.3.7.01.07.01.019	Akumulasi Penyusutan Alat kedokteran Nuklir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	1.3.7.01.07.01.020	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	1.3.7.01.07.01.021	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	1.3.7.01.07.01.022	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	1.3.7.01.07.01.023	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	1.3.7.01.07.01.024	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran I C U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	1.3.7.01.07.01.025	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran I C C U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	1.3.7.01.07.01.026	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Jantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	1.3.7.01.07.01.027	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Traditional Medicine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	1.3.7.01.07.01.028	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Anaesthesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	1.3.7.01.07.01.029	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	1.3.7.01.07.01.030	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	1.3.7.01.07.02.001	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Matra Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	1.3.7.01.07.02.002	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Matra Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	1.3.7.01.07.02.003	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Kepolisian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	1.3.7.01.07.02.004	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumusi Awal	TAMBAH					KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU	
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas						KOREKSI
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakomptabel			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakomptabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312	1.3.7.01.08.02.006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	1.3.7.01.08.03.001	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	1.3.7.01.08.03.002	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Matematika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	1.3.7.01.08.03.003	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	1.3.7.01.08.03.004	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	1.3.7.01.08.03.005	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	1.3.7.01.08.03.006	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Atas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	1.3.7.01.08.03.007	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	1.3.7.01.08.03.008	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Agama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	1.3.7.01.08.03.009	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Keterampilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	1.3.7.01.08.03.010	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Kesenian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	1.3.7.01.08.03.011	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	1.3.7.01.08.03.012	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi PKN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	1.3.7.01.08.03.013	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Luar Diksa, Tuna Rungu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	1.3.7.01.08.03.014	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Kejuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	1.3.7.01.08.03.015	Akumulasi Penyusutan PAUD/TK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	1.3.7.01.08.03.016	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	1.3.7.01.08.04.001	Akumulasi Penyusutan Radiation Detector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	1.3.7.01.08.04.002	Akumulasi Penyusutan Modular Counting and Scientific Electronic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	1.3.7.01.08.04.003	Akumulasi Penyusutan Assembly/Counting System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	1.3.7.01.08.04.004	Akumulasi Penyusutan Recorder Display	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	1.3.7.01.08.04.005	Akumulasi Penyusutan System/Power Supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	1.3.7.01.08.04.006	Akumulasi Penyusutan Measuring/Testing Device	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	1.3.7.01.08.04.007	Akumulasi Penyusutan Opto Electronics	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	1.3.7.01.08.04.008	Akumulasi Penyusutan Accelerator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	1.3.7.01.08.04.009	Akumulasi Penyusutan Reactor Experimental System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	1.3.7.01.08.04.010	Akumulasi Penyusutan Alat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	1.3.7.01.08.05.001	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Fisika Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	1.3.7.01.08.05.002	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	1.3.7.01.08.05.003	Akumulasi Penyusutan Proteksi Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	1.3.7.01.08.05.004	Akumulasi Penyusutan Meteorological Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	1.3.7.01.08.05.005	Akumulasi Penyusutan Sumber Radiasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	1.3.7.01.08.05.006	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	1.3.7.01.08.06.001	Akumulasi Penyusutan Radiation Application Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	1.3.7.01.08.06.002	Akumulasi Penyusutan Non Destructive Test (NDT) Device	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	1.3.7.01.08.06.003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Hidrologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	1.3.7.01.08.06.004	Akumulasi Penyusutan Radion Laboratory Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	1.3.7.01.08.06.005	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN UMUM KEDOKTERAN / KLINIK NUKLIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	1.3.7.01.08.07.001	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kwalitas Air dan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	1.3.7.01.08.07.002	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kwalitas Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	1.3.7.01.08.07.003	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumulasi Awal	TAMBAH						KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas			KOREKSI			
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset EkstrakompTAB			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset EkstrakompTabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
353	1.3.7.01.08.07.004	Akumulasi Penyusutan Laboratorium Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	1.3.7.01.08.07.005	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	1.3.7.01.08.07.006	Akumulasi Penyusutan Alat Laboretorium Lingkungan Hidup Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
356	1.3.7.01.08.08.001	Akumulasi Penyusutan Towing Carriage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	1.3.7.01.08.08.002	Akumulasi Penyusutan Wave Generator and Absorber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	1.3.7.01.08.08.003	Akumulasi Penyusutan Data Acquisition and Analyzing System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	1.3.7.01.08.08.004	Akumulasi Penyusutan Cavitation Tunnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	1.3.7.01.08.08.005	Akumulasi Penyusutan Overhead Cranes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	1.3.7.01.08.08.006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	1.3.7.01.08.08.007	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Model Ship Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	1.3.7.01.08.08.008	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Propeller Model Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
364	1.3.7.01.08.08.009	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Mechanical Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	1.3.7.01.08.08.010	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
366	1.3.7.01.08.08.011	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Painting Shop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	1.3.7.01.08.08.012	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	1.3.7.01.08.08.013	Akumulasi Penyusutan Pemesinan : Electrical Workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	1.3.7.01.08.08.014	Akumulasi Penyusutan MOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	1.3.7.01.08.08.015	Akumulasi Penyusutan Photo and Film Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	1.3.7.01.08.08.016	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	1.3.7.01.08.09.001	Akumulasi Penyusutan Alat Biomedik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	1.3.7.01.08.09.002	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standard dan Kalibrator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	1.3.7.01.08.09.003	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	1.3.7.01.08.09.004	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	1.3.7.01.08.09.005	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	1.3.7.01.08.09.006	Akumulasi Penyusutan Alat Instrumentasi Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	1.3.7.01.08.09.007	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Nautis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	1.3.7.01.08.09.008	Akumulasi Penyusutan Alat Telekomunikasi Pelayaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	1.3.7.01.08.09.009	Akumulasi Penyusutan Alat Pelayaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	1.3.7.01.08.09.010	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Uji Perangkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	1.3.7.01.08.09.011	Akumulasi Penyusutan Alat Instrumentasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383	1.3.7.01.09.01.001	Akumulasi Penyusutan Senjata Genggam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	1.3.7.01.09.01.002	Akumulasi Penyusutan Senjata Pinggang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	1.3.7.01.09.01.003	Akumulasi Penyusutan Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
386	1.3.7.01.09.01.004	Akumulasi Penyusutan Senapan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	1.3.7.01.09.01.005	Akumulasi Penyusutan Mortir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	1.3.7.01.09.01.006	Akumulasi Penyusutan Anti Lapis Baja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	1.3.7.01.09.01.007	Akumulasi Penyusutan Artileri Medan (Armed)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	1.3.7.01.09.01.008	Akumulasi Penyusutan Artileri Pertahanan Udara (Artanud)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	1.3.7.01.09.01.009	Akumulasi Penyusutan Kavaleri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392	1.3.7.01.09.01.010	Akumulasi Penyusutan Senjata Lain- Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	1.3.7.01.09.02.001	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	1.3.7.01.09.02.002	Akumulasi Penyusutan Non Senjata Api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumusi Awal	TAMBAH						KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas			KOREKSI			
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset EkstrakompTAB			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset EkstrakompTabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
483	1.3.7.01.17.01.012	Akumulasi Penyusutan Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	1.3.7.01.17.01.013	Akumulasi Penyusutan Gas-Solid Drying Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	1.3.7.01.17.01.014	Akumulasi Penyusutan Gas-Solid Fluided Bed Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	1.3.7.01.17.01.015	Akumulasi Penyusutan Gas-Solid Separation Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	1.3.7.01.17.01.016	Akumulasi Penyusutan Gas-Liquid Distillation Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	1.3.7.01.17.01.017	Akumulasi Penyusutan Gas-Liquid Separation Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	1.3.7.01.17.01.018	Akumulasi Penyusutan Isotope Separation Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	1.3.7.01.17.01.019	Akumulasi Penyusutan Transport and Storage Equipment For Liquid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	1.3.7.01.17.01.020	Akumulasi Penyusutan Solid Material Handling Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	1.3.7.01.17.01.021	Akumulasi Penyusutan Size Reduction Size Balangement Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	1.3.7.01.17.01.022	Akumulasi Penyusutan Heat Generating Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	1.3.7.01.17.01.023	Akumulasi Penyusutan Heat Transfer Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	1.3.7.01.17.01.024	Akumulasi Penyusutan Mechanical Proces	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	1.3.7.01.17.01.025	Akumulasi Penyusutan Chemical Reakdon Equipment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	1.3.7.01.17.01.026	Akumulasi Penyusutan Peratan Proses/Produksi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498	1.3.7.01.18.01.001	Akumulasi Penyusutan Rambu Bersuar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	1.3.7.01.18.01.002	Akumulasi Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	1.3.7.01.18.01.003	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	1.3.7.01.18.02.001	Akumulasi Penyusutan Runway/Threshold Light	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	1.3.7.01.18.02.002	Akumulasi Penyusutan Visual Approach Slope Indicator (VASI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	1.3.7.01.18.02.003	Slope Indicator (VASI) Akumulasi Penyusutan Runway	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	1.3.7.01.18.02.004	Akumulasi Penyusutan Runway Identification Light (Relis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	1.3.7.01.18.02.005	Akumulasi Penyusutan Signal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	1.3.7.01.18.02.006	Akumulasi Penyusutan Flood Lights	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	1.3.7.01.18.02.007	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	1.3.7.01.18.03.001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	1.3.7.01.18.03.002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	1.3.7.01.19.01.001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga Atletik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	1.3.7.01.19.01.002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Permainan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	1.3.7.01.19.01.003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Senam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	1.3.7.01.19.01.004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	1.3.7.01.19.01.005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	1.3.7.01.19.01.006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	1.3.7.02.01.01.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	16	21.919.513.747,00	11.465.816.415,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	457.822.007,56	11.623.638.422,82	9.995.875.324,18
517	1.3.7.02.01.01.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	1.3.7.02.01.01.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	1.3.7.02.01.01.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	1.3.7.02.01.01.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	1.3.7.02.01.01.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumulasi Awal	TAMBAH						KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas			KOREKSI			
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakomptab			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakomptabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
604	1.3.7.03.01.02.010	Akumulasi Penyusutan Jembatan penyeberangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	1.3.7.03.01.02.011	Akumulasi Penyusutan Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	1.3.7.03.01.02.012	Akumulasi Penyusutan Jembatan Pengukur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	1.3.7.03.01.02.013	Akumulasi Penyusutan Jembatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	1.3.7.03.02.01.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
609	1.3.7.03.02.01.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	1.3.7.03.02.01.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	1.3.7.03.02.01.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	1.3.7.03.02.01.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	1.3.7.03.02.01.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	1.3.7.03.02.01.007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	1.3.7.03.02.01.008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Alir Irigasi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	1.3.7.03.02.02.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	1.3.7.03.02.02.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	1.3.7.03.02.02.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	1.3.7.03.02.02.004	Akumulasi Penyusutan Saluran Pembuang Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	1.3.7.03.02.02.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	1.3.7.03.02.02.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	1.3.7.03.02.02.007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	1.3.7.03.02.02.008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaliran Pasang Surut Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	1.3.7.03.02.03.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	1.3.7.03.02.03.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	1.3.7.03.02.03.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	1.3.7.03.02.03.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	1.3.7.03.02.03.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	1.3.7.03.02.03.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	1.3.7.03.02.03.007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	1.3.7.03.02.03.008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632	1.3.7.03.02.04.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Penanggulangan Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	1.3.7.03.02.04.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	1.3.7.03.02.04.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	1.3.7.03.02.04.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	1.3.7.03.02.04.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pengaman Sungai/Pantai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	1.3.7.03.02.04.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	1.3.7.03.02.04.007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	1.3.7.03.02.05.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	1.3.7.03.02.05.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	1	120.000.000,00	64.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	68.000.000,00	52.000.000,00

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumusi Awal	TAMBAH						KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas			KOREKSI			
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakomptab			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakomptabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
641	1.3.7.03.02.05.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	1.3.7.03.02.05.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	1.3.7.03.02.05.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	1.3.7.03.02.05.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	1.3.7.03.02.05.007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Sewah Ingasi Air Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	1.3.7.03.02.05.008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tanah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	1.3.7.03.02.06.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1	70.275.000,00	26.320.161,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.831.451,61	28.151.612,90	42.123.387,10
648	1.3.7.03.02.06.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	1.3.7.03.02.06.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	1.3.7.03.02.06.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	1.3.7.03.02.06.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	1.3.7.03.02.06.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	1.3.7.03.02.07.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	1.3.7.03.02.07.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	1.3.7.03.02.07.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	1.3.7.03.02.07.004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Air Kotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	1.3.7.03.02.07.005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	1.3.7.03.02.07.006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Kotor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	1.3.7.03.02.08.001	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR LAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	1.3.7.03.02.08.002	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR TAWAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	1.3.7.03.03.01.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Permukaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	1.3.7.03.03.01.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Sumber/Mata Air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	1.3.7.03.03.01.003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	1.3.7.03.03.01.004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	1.3.7.03.03.01.005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	1.3.7.03.03.02.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	1.3.7.03.03.02.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Buangan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	1.3.7.03.03.02.003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Buangan Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	1.3.7.03.03.02.004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	1.3.7.03.03.03.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	1.3.7.03.03.03.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	1.3.7.03.03.03.003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Penampung Sampah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	1.3.7.03.03.03.004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674	1.3.7.03.03.04.001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Percontohan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
675	1.3.7.03.03.04.002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	1.3.7.03.03.04.003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumuaasi Awal	TAMBAH					KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU	
			Jml	Harga		Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas						KOREKSI
								Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakomptab			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakomptabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
716	1.3.7.03.04.03.004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Dengan Media Udara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717	1.3.7.03.04.03.005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718	1.3.7.03.04.04.001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Gas Transmisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	1.3.7.03.04.04.002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	1.3.7.03.04.04.003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Pipa Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	1.3.7.03.04.04.004	Akumulasi Penyusutan Jaringan BBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	1.3.7.03.04.04.005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	1.3.7.04.01.01.001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.260	71.822.512.163,00	57.575.015.292,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.297.727.509,38	58.872.742.801,57	12.949.789.361,43



Mengetahui,
 KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 PROVINSI JAWA TENGAH
DE FRANCISCA JULIA TAVARES, SP. MSI
 NIP. 19720502 199903 2 008

Semarang, 31 Desember 2023

Pengurus Barang

SUNYADI

NIP. 19670918 198902 1 001